LAPORAN TAHUNAN 2024

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

DITERBITKAN OLEH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

PENYUSUN
BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
SEKRETARIAT BPSDM HUKUM

BPSDM HUKUM
JALAN RAYA GANDUL NO.4
CINERE DEPOK JAWA BARAT
www.bpsdm.kemenkumham.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menyelenggarakan pelatihan, pendidikan, serta penilaian kompetensi pada Tahun Anggaran 2024.

Laporan Tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaporkan kinerja organisasi serta kinerja anggaran selama Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Tahunan ini mencakup keberhasilan, hambatan, serta tantangan yang dihadapi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum pada Tahun Anggaran 2024.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan Laporan Tahunan ini. Dengan tersusunnya Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi para pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami terbuka dan menerima segala kritik serta saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhir kata, semoga Laporan Tahunan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Tahun Anggaran 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Kepala BPSDM Hukum

Gusti Ayu Putu Suwardani

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) merupakan Unit Eselon I Kementerian Hukum yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hukum dan hak asasi manusia. BPSDM Hukum bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Hukum . Bentuk pengembangan SDM yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum adalah Pendidikan dan Pelatihan. Pendidikan diselenggarakan oleh satuan kerja BPSDM Hukum yaitu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Pengembangan SDM dalam bentuk Pelatihan diselenggarakan oleh unit BPSDM Hukum yaitu Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan serta Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional serta 3 (tiga) Balai Diklat Hukum.

Pada Tahun Anggaran 2024, BPSDM Hukum telah menyelenggarakan pengembangan kompetensi dengan output peserta sebanyak 369.256 pegawai Kementerian Hukum . Output tersebut dapat tercapai karena BPSDM Hukum telah melakukan peningkatan dalam hal pelayanan pelatihan dengan cara menambah metode pengembangan kompetensi yaitu berupa Webinar dan *Massive Open Online Courses* (MOOC). Dengan bertambahnya metode pengembangan kompetensi, output pegawai Kementerian Hukum yang mendapatkan pengembangan kompetensi dapat melebihi target yang telah ditetapkan walaupun pada tahun tersebut BPSDM Hukum beberapa kali mengalami *Automatic Adjustment*. Dari jumlah output pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi, sebanyak 14.949 pegawai mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan baik secara klasikal maupun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), tatap Muka dan sejumlah 354.307 pegawai mengikuti pengembangan kompetensi dengan metode lainnya seperti Webinar, Community of Practice, MOOC dan e-Learning. BPSDM Hukum juga menyelenggarakan pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak 270 peserta dan Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 319 peserta sebagai bentuk pemenuhan kegiatan berskala program prioritas nasional.

BPSDM Hukum juga menyelenggarakan pendidikan sehingga mencetak kader di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian melalui Poltikenik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM). Pada Tahun Anggaran 2024, sebanyak 1.312 taruna mengikuti pendidikan kedinasan POLTEKIP dan sebanyak 1.209 taruna mengikuti pendidikan kedinasan POLTEKIM. Pada akhir

tahun 2024, sebanyak 334 taruna Tingkat IV POLTEKIP dan 291 taruna Tingkat IV POLTEKIM dinyatakan lulus mengikuti pendidikan kedinasan dan ditempatkan sesuai dengan kompetensinya.

Selain penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, BPSDM Hukum juga menyelenggarakan penilaian kompetensi bagi pegawai Kementerian Hukum melalui Pusat Penilaian Kompetensi. Pada Tahun Anggaran 2024, Pusat Penilaian Kompetensi telah melakukan penilaian kompetensi kepada 5.520 pegawai melalui kegiatan Penilaian Kompetensi dan Potensi, serta Penilaian Preferensi Kompetensi. Hasil penilaian kompetensi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar untuk pembentukan pola karir dan pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum.

Dari sisi penyerapan anggaran, Per 31 Desember 2024 BPSDM Hukum telah mencatat realisasi anggaran sebesar Rp. **Rp. 315.540.371.385,-** atau telah mencapai 97,93% dari pagu anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 322.216.750.000,-**. Berikut rincian pagu anggaran serta realisasi per unit dan satuan kerja BPSDM Hukum:

No	BAGIAN/SATKER	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM	Rp. 10.173.317.000,-	Rp. 9.650.820.719,-	(94,86%)
2	Pusat Penilaian Kompetensi	Rp. 3.516.061.000,-	Rp. 3.301.712.601,-	(93.90%)
3	Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	Rp. 15.655.789.000,-	Rp. 14.256.684.195,-	(91.06%)
4	SEKRETARIAT	Rp. 163.255.291.000,-	Rp. 160.955.693.953,-	(98.59%)
5	POLTEKIM	Rp. 44,285,890,000,-	Rp. 43,901,148,667,-	(99.13%)
6	POLTEKIP	Rp. 46,141,131,000,-	Rp. 45,938,814,442,-	(99.56%)
7	Badiklat Kepulauan Riau	Rp. 13,903,108,000,-	Rp. 12,518,324,917,-	(90.04%)
8	Badiklat Jawa Tengah	Rp. 13,366,666,000,-	Rp. 13,192,690,212,-	(98.70%)
9	Badiklat Sulawesi Utara	Rp. 11,919,497,000,-	Rp. 11,824,481,679,-	(99.20%)
TOTAL		**Rp. 322.216.750.000,-**	**Rp. 315.540.371.385,-**	**(97.93%)**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Hukum M sebagai pelaksana dalam pengembangan kompetensi aparatur di bidang hukum , terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh BPSDM Hukum adalah adanya kebijakan *Automatic Adjustment*. *Automatic Adjustment* merupakan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran secara otomatis, mencakup realokasi anggaran, pemotongan anggaran belanja Negara, penyesuaian pagu, dan/atau pergeseran anggaran antarprogram. Dengan adanya kebijakan tersebut, beberapa kegiatan pelatihan serta penilaian kompetensi di tahun 2024 tidak dapat terlaksana atau harus di revisi. Kendala lainnya adalah kurangnya jumlah SDM asesor yang ada di lingkungan Kementerian Hukum untuk melakukan penilaian kompetensi kepada seluruh pegawai Kementerian Hukum setiap tahunnya.

Upaya yang bisa dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja di lingkungan BPSDM Hukum untuk menghasilkan peserta pelatihan yang berkompeten di bidangnya antara lain, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, kurikulum dan modul yang selalu up to date serta pengawasan terhadap satuan kerja di bawah BPSDM Hukum secara berkala terhadap capaian kinerja, pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

IKTISAR EKSEKUTIF ii

BAB I PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Organisasi, Tugas dan Fungsi 3

Maksud dan Tujuan 7

Ruang Lingkup Pembahasan 7

Sumber Daya Manusia 8

Sistematika Pelaporan 8

BAB II DATA RENCANA KERJA 10

Rencana Strategis 10

Rencana Kegiatan 13

Rencana Penyerapan Anggaran 37

BAB III PELAKSANAAN KINERJA 38

Capaian Kinerja 38

Capaian Kinerja Lainnya 76

Implementasi Reformasi Birokrasi 86

BAB IV PENUTUP 103

Simpulan 103

Saran 104

01 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan Kompetensi ASN menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pengembangan Kompetensi ASN banyak menghadapi permasalahan baik yang datang dari dalam maupun dari luar pemerintah. Banyak kebijakan pengembangan kompetensi belum didasarkan pada analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Permasalahan lain yang mendasari adalah Pengembangan Kompetensi hanya diartikan secara sempit sebagai pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara klasikal serta dilakukan secara terpisah dengan pola karir. Hal demikian yang merujuk untuk disusun kebijakan tentang pengembangan kompetensi bagi ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 49 antara lain:

(1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi;

(2) Pembelajaran dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi;

(3) Pembelajaran terintegrasi merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN yang terintegrasi dengan pekerjaan, sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN, serta terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak terkait.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil wajib dipenuhi paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Kementerian Hukum dan HAM, sebelum berubah nomenklatur menjadi Kementerian Hukum, sebagai instansi pemerintah telah merespon kebijakan ini dengan menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri tersebut menegaskan bahwa negara telah menyiapkan proyeksi

pemetaan karier dan menyediakan wadah pembelajaran yang telah mengadopsi pemanfaatan teknologi dalam metode pembelajarannya. Negara membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang profesional menerapkan *core value* **Ber-AKHLAK**, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

Berorientasi Pelayanan
Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat

Akuntabel
Bertanggung jawab atas kepercayan yang diberikan

Kompeten
Terus belajar dan mengembangan kapabilitas

Harmonis
Saling peduli dan menghargai perbedaan

Loyal
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

Adaptif
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan

Kolaboratif
Membangun kerjasama yang sinergis

Menjalankan tugas sebagai *leading sector* di bidang pengembangan sumber daya manusia Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan pengembangan SDM melalui pengembangan kompetensi, meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM untuk meningkatkan kompetensi seluruh pegawai dan penguatan unit kediklatan agar semakin berkualitas, cerdas, terampil dan bermartabat melalui Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis dan Fungsional serta Manajerial dan Sosial Kultural.

B. Organisasi , Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dRepublik Indonesia, BPSDM Hukum mempunyai tugas melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Hukum . Untuk melaksanakan tugas dimaksud, BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum;
2. pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian;
3. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang Hukum;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum ;
5. pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum terdiri dari beberapa satuan kerja yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:

SEKRETARIAT BPSDM HUKUM

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BPSDM Hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum ;
b. koordinasi dan fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;
c. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, pelaksanaan pemantauan pengendalian internal, dan manajemen risiko;
d. koordinasi dan pengelolaan urusan sumber daya manusia pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum;
e. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi dan pelindungan hukum pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum d;

f. koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum;
g. koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum ;
h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepustakaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan.

PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis rencana,
program, dan anggaran di bidang pelatihan teknis dan kepemimpinan;

a. penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
b. penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
c. koordinasi dan pembinaan teknis substansi penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
d. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan; dan
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN FUNGSIONAL

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan fungsional . Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran di bidang pelatihan fungsional;
b. penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pelatihan fungsional;
c. penyelenggaraan pelatihan fungsional;

d. koordinasi dan pembinaan teknis substansi penyelenggaraan pelatihan fungsional;
e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan fungsional; dan
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional.

PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI

Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi dan pengelolaan sistem informasi bidang pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penilaian kompetensi;
b. penyusunan standardisasi dan penilaian kompetensi;
c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penilaian kompetensi;
d. pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia; dan
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Penilaian Kompetensi.

POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN

Poltekip memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Poltekip memiliki fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedinasan dibidang Ilmu Pemasyarakatan;
b. melakukan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Pemasyarakatan.

POLITEKNIK IMIGRASI

Politeknik Imigrasi memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian. Dalam melaksanakan tugasnya, Poltekim memiliki fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedinasan dibidang Keimigrasian;
b. melakukan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Keimigrasian.

BALAI DIKLAT HUKUM

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum yang berada di Jawa Tengah, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara dengan tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum a sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Pendirian Balai Diklat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPSDM Hukum dan HAM

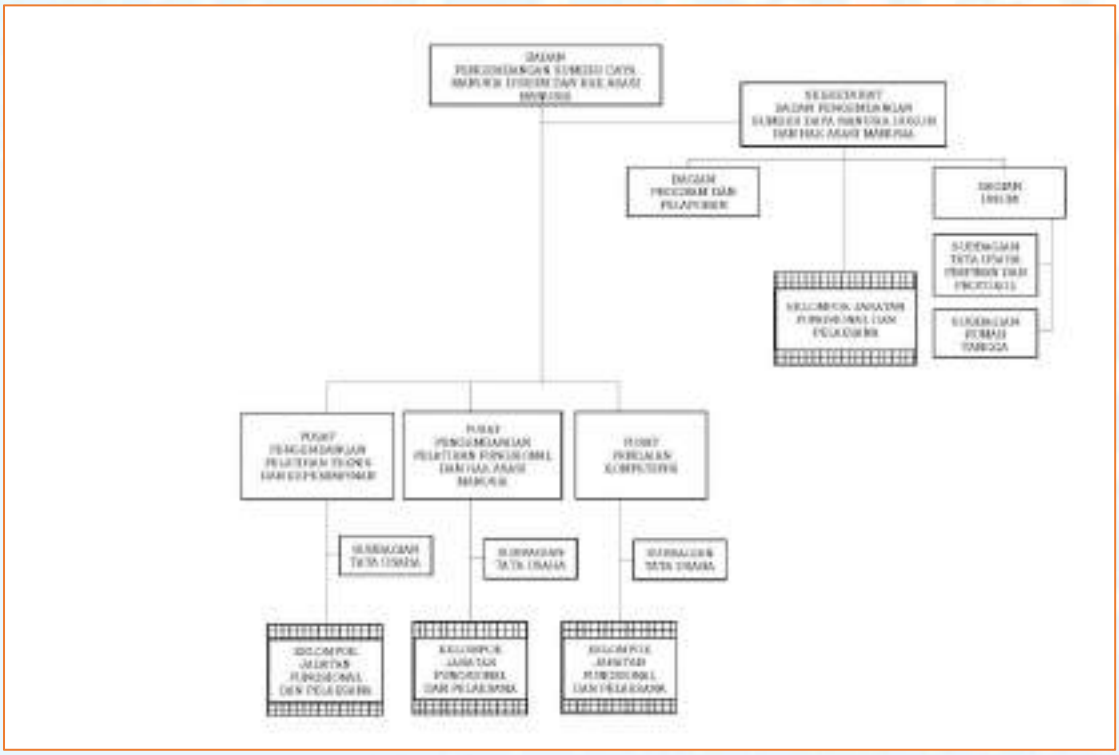

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Tahunan merupakan laporan yang disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum selama satu tahun kegiatan. Maksud dan Tujuan pembuatan Laporan Tahunan 2024 BPSDM Hukum untuk:

1. Memberikan informasi kepada pimpinan organisasi berkenaan tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2024;
2. Bahan masukan Pimpinan BPSDM Hukum dalam hal pengambilan keputusan berkenaan dengan model pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia hukum serta program kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 di lingkungan BPSDM Hukum .

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan pada Laporan Tahun 2024 BPSDM Hukum sebagai berikut:

1. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDM Hukum baik dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun non-diklat pada tahun 2024;
2. Pengelolaan Anggaran BPSDM Hukum selama tahun anggaran 2024.

E. Sumber Daya Manusia

BPSDM Hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengembangan SDM didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 467 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda

Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

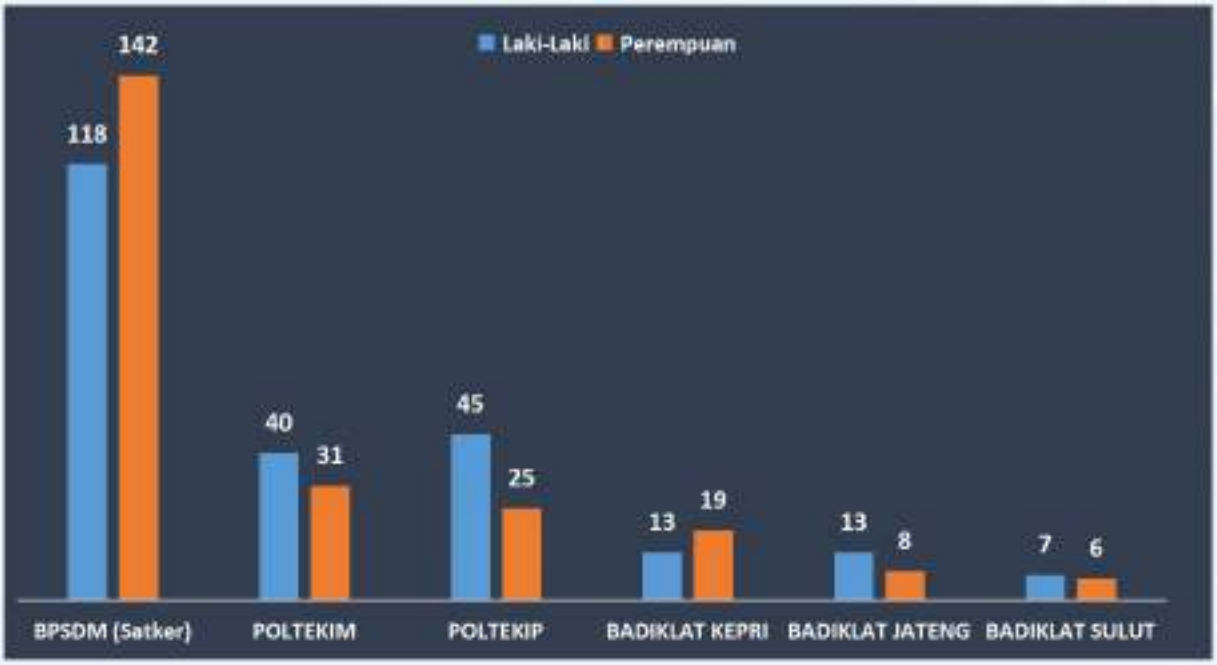

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika Laporan Tahunan BPSDM Hukum Tahun 2024 tidak terlepas dalam Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Kementerian Hukum, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

Pada Bagian ini menguraikan gambaran umum dari satuan kerja dan hal-hal yang mendasari disusunnya laporan tahunan.

BAB II DATA RENCANA KINERJA;

Bagian ini menyajikan data dan kenyataan yang ada dilapangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA

Bagian ini menyajikan analisa terhadap data dan kenyataan di lapangan mengenai hambatan serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN;

Bagian ini membuat saran dan usulan untuk mendapatkan pemecahan dan penyelesaian dari permasalahan yang ada.

02 BAB II DATA RENCANA KERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

> "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan Misi Nomor 7 yaitu Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga

Untuk mewujudkan visi dan misi itu maka disusunlah Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM dengan indikator kinerja dan target yang harus dipenuhi setiap tahun. Sasaran strategis adalah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Dari hasil inventarisasi strategi yang telah dilakukan, maka Kementerian Hukum dan HAM menetapkan sasaran strategis tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 1 (SS1): Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia
Sasaran Strategis 2 (SS2): Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran Strategis tersebut kemudian diturunkan kepada masing-masing Unit Eselon I dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM kedalam 4 program yaitu program Dukungan Manajemen, program Penegakan dan Pelayanan Hukum, program Pembentukan Regulasi, serta program Pemajuan dan Penegakan HAM dengan sasaran program sesuai dengan masing-masing Unit Eselon I termasuk BPSDM Hukum dan HAM. Berikut Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024

PROGRAM

Dukungan Manajemen

SASARAN PROGRAM

1. Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Meningkatnya Mutu Perguruan Tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Meningkatnya Penerapan RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 2.2 Sasaran Program BPSDM Hukum

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Hukum;	Indeks Penilaian Kompetensi ASN Hukum	3.22
	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Hukum	3,44
2. Meningkatnya Mutu Perguruan Tinggi Hukum	Persentase Pemenuhan 9 (Sembilan) Kriteria Standar dalam Rangka Akreditasi	100%
3. Meningkatnya Penerapan RB di lingkungan Kementerian Hukum	Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	82%

Untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tiap-tiap indikator pada sasaran program tersebut, pada awal tahuan BPSDM Hukum pada diberikan pagu tahun 2024 sebesar Rp. 315.540.371.385,- yang terbagi menjadi 9 rincian kegiatan. Namun, ditengah tahun berjalan terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* serta penambahan anggaran sehingga anggaran yang tersedia sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 322.216.750.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Fungsional	**10.173.317.000**
2	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur	**3.516.061.000**
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	**15.655.789.000**
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	**163.255.291.000**
5	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan bidang Pemasyarakatan	**46.141.131.000**
6	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan bidang Imigrasi	**44.285.890.000**
7	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Kepri)	**13.903.108.000**
8	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Jateng)	**13.366.666.000**
9	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Sulut)	**11.919.497.000**
	Total	**322.216.750.000,-**

B. Rencana Kegiatan

Dari anggaran yang telah diterima tersebut kemudian diwujudkan ke dalam berbagai kegiatan pada unit dan satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum. Berikut rencana kegiatan tahun 2024 pada masing-masing unit dan satuan kerja BPSDM Hukum.

1. Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan fungsional. Pada Tahun 2024 Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional menganggarkan pagu sebesar Rp. 10.173.317.000,- untuk melaksanakan layanan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang fungsional serta Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan

Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional sesuai dengan fungsinya

- Perencanaan Pengembangan Kompetensi

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pada Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.460.988.000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Perencanaan Pengembangan Kompetensi	1. Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan Fungsional dan HAM 2. Penyusunan Modul Penjenjangan Pelatihan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan 3. Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan 4. Penyusunan Materi MOOC Pembimbing Kemasyarakatan 5. Penguatan Pengelolaan Media Sosial bagi Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional dan HAM
Perencanaan Pengembangan Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	1. Perencanaan Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional mempunyai anggaran sebesar Rp. 6.924.461.000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan pelatihan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rencana Pelaksanaan Pelatihan Fungsional

	PELATIHAN	TARGET
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi - RM	Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama	26
	Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama **(2 Angkatan)**	60
	Pelatihan Fungsional Penjenjangan Auditor Ahli Muda Metode Blended Learning	10
	Pelatihan ACLS Bagi Fungsional Dokter	30
	Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama **(2 Angkatan)**	59
	TOT Tenaga Pengajar Pelatihan Fungsional Analis Hukum	29
	Pelatihan Fungsional Pranata Komputer TK Ahli	25
	Pelatihan Fungsional Penjenjangan Auditor Ahli Pertama Metode Blended Learning	12
	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsinal Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Blended Learning	25
	Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Muda	30
	Pelatihan Penjenjangan JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	30
	Massive Open Online Course (MOOC)	535
	Webinar Series (Ke-2, Ke-4 dan Ke-6	139.859
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi - PNBP	Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (PNBP)	25
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi-PN	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama (2 angkatan)	80
	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Metode Blended Learning (6 angkatan)	239
Total		**22.135**

- Penyusunan Laporan dan Evaluasi

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi pada Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.026.439.000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Penyusunan Laporan dan EvaluasiPengembangan Kompetensi	1. Penyusunan Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan pada JF Terbuka 2. Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan Fungsional dan HAM 3. Evaluasi Pasca Pelatihan Fungsional Keimigrasian
Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan

2. Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan Teknis dan Kepemimpinan. Pada Tahun 2024 Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan menganggarkan pagu sebesar Rp. 15.655.789.000,- untuk melaksanakan layanan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang teknis dan kepemimpinan serta Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya.

Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan sesuai dengan fungsinya

- Perencanaan Pengembangan Kompetensi

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pada Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.297.288.000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Perencanaan Pengembangan Kompetensi	1. Penyiapan Dokumen Rencana Kegiatan dan Kebijakan Diklat Teknis Dan Kepemimpinan 2. Penyusunan Pedoman Sistematika Laporan Pelatihan 3. Penyusunan Kurikulum dan RBPP RBPMP Pelatihan Teknis Pemasyarakatan 4. Penyusunan Modul Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar 5. Penyusunan Modul Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Lanjutan
Perencanaan Pengembangan Kompetensi di Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya	Perencanaan Pengembangan Kompetensi di Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan mempunyai anggaran sebesar Rp. 52.603.985.000,- yang terdiri dari beberapa kegiatan pelatihan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rencana Pelaksanaan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

	Pelatihan	Target
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi - RM	Pelatihan Dasar CPNS bagi Alumni POLTEKIP dan POLTEKIM	595
	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	40
	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	40
	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	-
	Pelatihan Dasar CPNS Umum	-
	Orientasi Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	878
	Pendidikan Khusus Keimigrasian bagi Lulusan Program D-IV (DiplomaEmpat) Politeknik Imigrasi	289
	Pelatihan Assesment Resiko dan Klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan	199
	Pelatihan Manajemen Resiko	30
	Pelatihan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	160
	Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian	30
	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)	20
	Massive Open Online Course (MOOC) Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar	19.054
	Massive Open Online Course (MOOC) Pelayanan Publik Tingkat Dasar	3426
	Massive Open Online Course (MOOC) Manajemen Resiko	2895
	Massive Open Online Course (MOOC) Pendaftaran Merk	1603
	Massive Open Online Course (MOOC) Penyelenggaraan Pengawasan	2498
	Massive Open Online Course (MOOC) Perseroan Perorangan	1604
	Massive Open Online Course (MOOC) Sipkumham	2333
	Massive Open Online Course (MOOC) Tentang Imigrasi	2968
	Massive Open Online Course (MOOC) Best Practice Keimigrasian	7284
	Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas	80

	(Prestasi)	
	Webinar Series	153.776
	Certified Risk Management Officer (CRMO)	13
	Pelatihan Audit Investigatif Level 1	13
	Pelatihan Forensic dan Data Analytic	25
	Pelatihan Coaching dan Mentoring	1777
	Pendidikan Khusus Keimigrasian Bagi Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal Imigrasi	1
	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS	150
	Pelatihan Intelejen Dasar Direktorat Jenderal Imigrasi	150
	Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Deteni Direktorat Jenderal Imigrasi	60
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya	Pelatihan SPPA	270
Total		**51.069**

- Penyusunan Laporan dan Evaluasi

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi pada Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional mempunyai anggaran sebesar Rp. 370.299.000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi	1. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Per Kegiatan Diklat Teknis dan Kepemimpinan 2. Supervisi Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan di Badiklat 3. Evaluasi Pasca Pelatihan PKN TK.II, PKA, PKP dan Pelatihan Dasar CPNS
Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi di Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi di Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya

3. Pusat Penilaian Kompetensi

Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi dan pengelolaan sistem informasi bidang pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum. Pada Tahun 2023 Pusat Penilaian Kompetensi menganggarkan pagu sebesar Rp. 3.331.975.000,- untuk melaksanakan layanan penilaian kompetensi dan pengelolaan sistem informasi bidang pengembangan kompetensi.

Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pusat Penilaian Kompetensi sesuai dengan fungsinya

- Perencanaan Penilaian Kompetensi

Perencanaan Penilaian Komptensi pada Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai anggaran sebesar Rp. 545.649.000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Perencanaan Penilaian Kompetensi	1. Penyusunan Rencana Program Penilaian Kompetensi 2. Penyusunan Desain Simulasi 3. Penyusunan Sub Indikator Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural Level IV 4. Penyusunan Pedoman Penyampaian Feedback dan Laporan Hasil Penilaian Kompetensi 5. Workshop Pengembangan Asesor Dalam Simulasi Business Games

- Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi

Penyelenggaraan Penilaian Komptensi pada Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.205.649.000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Rencana Pelaksanaan Penilaian Kompetensi

No.	Kegiatan	Target
Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		
1.	Kantor Wilayah Aceh	60
2.	Kantor Wilayah Bali	60
3.	Kantor Wilayah Lampung	60
4.	Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	60
5.	Kantor Wilayah Kalimantan Timur	60

6.	Kantor Wilayah Riau	60
7.	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan	60
8.	Unit Eselon I	80
Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Kenaikan Jenjang Bagi Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		
1.	Penilaian Kompetensi melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2024	60
2.	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan Fungsional dilingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM	70
3.	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024	70
4.	Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Kenaikan Jenjang Jabatan dan Perpindahan dari Jabatan Lain Bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2024	70
5.	Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Kenaikan Jenjang dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Tahun 2024	60
6.	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan di Lingkungan Ditjen Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2024	70
7.	Penilaian Kompetensi Perpindahan Jabatan dari Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi ke Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Ham RI	1
8.	Penilaian Kompetensi Bagi Penugasan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	12
9.	Penilaian Kompetensi bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024	74
10.	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Ahli Utama Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta	30
11.	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal	227

	Imigrasi Tahun 2024	
12.	Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Pengisian Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama dan Analis Keimigrasian Ahli Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024	5
13.	Penilaian Kompetensi Perpindahan Dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024	9
14.	Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Kenaikan Jenjang di Lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional TA 2024	21
15.	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024	89
Penilaian Preferensi Kompetensi Dengan Metode Online		
1.	Penilaian Kompetensi di Lingkungan Inspektorat Jenderal TA 2024	15
2.	Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Perpindahan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2024	64
3.	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Pemeriksa Paten dan Pembimbing Kemasyarakatan Tahun 2024	162
4.	Penilaian Kompetensi di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM	227
5.	Penilaian Preferensi Kompetensi Dengan Metode Online	13.620
6.	Penilaian Kompetensi dilingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	3
Feedback Penilaian Kompetensi di Lingkungan Kemenkumham		
1.	Kanwil Aceh	65
2.	Kanwil Bali	65
3.	Kanwil Lampung	65
4.	Kanwil Sulawesi Selatan	35
5.	Kanwil Kalimantan Timur	47

- Evaluasi dan Laporan

Evaluasi dan Laporan pada Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai anggaran sebesar Rp. 144.092.000,- yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi	Kanwil Aceh
	Kanwil Bali
	Kanwil Lampung
	Kanwil Sulawesi Selatan

	Kanwil Kalimantan Timur
	Kanwil Riau
	Kanwil Kalimantan Selatan
	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Direktorat Jenderal Imigrasi
	Inspektorat Jenderal
	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
	Direktorat Jenderal Perundang-Undangan
Penyusunan Laporan	Penyusunan Laporan Monev Pemanfaatan hasil penilaian kompetensi
	Penyusunan Laporan Kinerja

- Penyelenggaraan Dukungan IT SDM

Evaluasi dan Laporan pada Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai anggaran sebesar Rp. 436.585.000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Dukungan IT SDM	Tata Kelola Data Dan Informasi
	Workshop Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Sistem Dan Informasi
	Rencana Strategis Teknologi Informasi Penilaian Dan Pengembangan Kompetensi
	User Acceptance Test (UAT) Aplikasi Competency Management System (CMS)
	Digitalisasi Laporan CI Dan Q-Com Penilaian Kompetensi
	Evaluasi Teknis Sistem Informasi Manajemen Rumah Belajar Dan Jaringan Internet Tahun 2023

4. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BPSDM Hukum. Pada tahun 2024, anggaran sebesar Rp. 114.052.258.000,- untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Rencana Kegiatan Sekretariat BPSDM Hukum

Layanan	Kegiatan	Anggaran
Layanan BMN	1. Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan BMN 2. Penatausahaan BMN 3. Layanan Pengadaan BMN 4. Asistensi Pengelolaan BMN Satker Badiklat	Rp. 732.992.000,-
Layanan Hubungan Masyarakat	1. Hubungan Pers dan Media 2. Penyelesaian Tidak Lanjut Pengaduan Masyarakat 3. Pameran Expo 4. Publikasi dan Promosi 5. Peliputan Kegiatan 6. Penerbitan Berita 7. Pelaksanaan Kerja Sama	Rp. 487.725.000,-
Layanan Protokoler	1. Koordinasi dan Pelaksanaan Keprotokoleran Antar Kementerian/Lembaga 2. Koordinasi Keprotokoleran Kementerian 3. Pelaksanaan Keprotokoleran	Rp. 112.274.000,-
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1. Administrasi Kelembagaan 2. Workshop Penyempurnaan SOP 3. Restrukturisasi Kelembagaan Penggabungan Politeknik	Rp. 1.001.352.000,-
Layanan Umum	1. Layanan Urusan Kerumahtanggaan 2. Keperluan Penunjang Pelaksanaan Tugas Fungsi 3. Tim Asisten Pengadaan, Pemeriksaan, Penerimaan, dan Pemeliharaan Perangkat dan Jaringan Teknologi Informasi	Rp. 633.847.000,-
Layanan Perkantoran	1. Pembayaran Gaji Tunjangan 2. Kendaraan Dinas Operasional 3. Langganan Daya dan Jasa 4. Pemeliharaan Gedung, Pagar dan Halaman 5. Pemeliharaan Peralatan Perkantoran 6. Belanja Keperluan Perkantoran 7. SEWA 8. Pengadaan Pakaian Dinas 9. Jamuan Tamu 10. Konsultasi/Koordinasi 11. Pengelola Keuangan dan BMN 12. Kesehatan Pegawai 13. Penangan Covid	Rp. 56.824.904.000,-
Layanan Sarana Internal	1. Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	Rp. 8.497.607.000,-

Layanan	Kegiatan	Anggaran
	2. Kendaraan Bermotor 3. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	
Layanan Prasarana Internal	Pembangunan gedung dan bangunan	Rp. 40.108.835.000,-
Layanan Manajemen SDM	1. Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian (Adm Jabfung Pemberhentian dan Umum Mutasi Kepegawaian) 2. Administrasi 15 Jabatan Fungsional di lingkungan BPSDM 3. Pembinaan Mental, Fisik dan Penguatan Disiplin Pegawai 4. Pengembangan Mandiri Pegawai 5. Penerbitan Jurnal BPSDM Hukum dan HAM	Rp. 429.308.000,-
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1. Penyusunan RKA-K/L TA 2024 2. Revisi RKA-K/L TA 2023 3. Supervisi Penyusunan RKA-K/L Balai Diklat TA 2024 4. Analisa Kebutuhan Anggaran TA 2025 5. Focus Group Discussion Penyusunan Kalender Kerja dan Skala Prioritas 2024 dan Analisa Kebutuhan Anggaran 2025 6. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Jasa Profesi	Rp. 1.142.499.000,-
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1. Supervisi dan Monitoring Kinerja BPSDM Hukum dan HAM 2. Penguatan dan Percepatan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM 3. Administrasi Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan 4. FGD Review Rencana Strategis Bpsdm Hukum Dan Ham 2020-2024 TA 2023 5. Workshop Penyusunan LKjIP TA 2023 6. Evaluasi Capaian Kinerja dan Penjaminan Mutu BPSDM Hukum dan HAM 7. Aplikasi E-Report Capaian Kinerja 8. Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja BPSDM Hukum dan HAM 9. Kegiatan Internalisasi Percepatan Tugas Dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM	Rp. 3.101.893.000,-
Layanan Manajemen Keuangan	1. Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran 2. Penyusunan Pedoman Pelaksanaaan Anggaran 3. Rekonsiliasi BPSDM Hukum dan HAM	Rp. 446.000.000,-

Layanan	Kegiatan	Anggaran
	4. Penyusunan Laporan Keuangan 5. Tindak Lanjut Audit atas Laporan Keuangan	
Layanan Reformasi Kinerja	1. Administrasi Fasilitasi RB, SPIP, Pembangunan ZI, WBK, WBBM 2. Penyusunan Manajemen Resiko 3. Workshop Tunas Integritas BPSDM Hukum dan HAM 4. Penguatan dan Pendampingan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 5. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Rp. 495.502.000,-
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1. Pengelolaan Arsip dan Persuratan 2. Pengelolaan Perpustakaan	Rp. 37.520.000,-

5. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi bidang pemasyarakatan. Pada Tahun 2024 Poltekip menganggarkan pagu sebesar Rp Rp. 46.141.131.000,- untuk melaksanakan kegiatan pendidikan kedinasan bidang pemasyarakatan.

Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Politeknik Pemasyarakatan sesuai dengan fungsinya

Tabel 2.8 Rencana Kegiatan Poltekip

Layanan	Kegiatan	Anggaran
Layanan BMN	1. Administrasi Pengadaan Barang/Jasa 2. Monitoring dan Evaluasi BMN 3. Layanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	Rp. 26,110,000,-
Layanan Perkantoran	1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Belanja Uang Lembur 3. Kendaraan Dinas Operasional 4. Langganan Daya dan Jasa 5. Pemeliharaan Peralatan Perkantoran 6. Keperluan Perkantoran 7. Pakaian Dinas 8. Pelantikan / Sumpah Jabatan 9. Koordinasi / Konsultasi 10. Honorarium Pengelola Keuangan 11. Kesehatan Pegawai 12. ATK dan Kebutuhan Lainnya	Rp. 7.637.347.000,-
Layanan Manajemen SDM	1. Administrasi Kepegawaian 2. Akreditasi Kelembagaan 3. Kegiatan Penelitian Ilmiah 4. Wisuda	Rp. 2,087,867,000,-

	5. Pelaksanaan Senat Akademik 6. Penyusunan Buku Ajar	
Pendidikan Taruna Tk I Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1. Pendidikan 2. Orientasi Lapangan 3. Seminar/Sosialisasi/Workshop	Rp. 7.383.695.000,-
Pendidikan Taruna Tk II Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1. Pendidikan 2. Praktek Kerja Lapangan 3. Seminar/Sosialisasi/Workshop	Rp. 7.387.209.000,-
Pendidikan Taruna Tk III Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1. Pendidikan 2. Kuliah Kerja Nyata 3. Seminar/Sosialisasi/Workshop	Rp. 7.625.695.000,-
Pendidikan Taruna Tk IIV Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1. Pendidikan 2. Magang 3. Penyegaran Kesamaptaan dan Menembak 4. Seminar/Sosialisasi/Workshop	Rp. 8,139,812,000
Masa Basis Calon Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1. Kesamaptaan 2. Pelantikan	Rp. 1.889.428.000,-
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1. Penyusunan Rencana Program	Rp. 3.780.000,-
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan 2. Rapat Evaluasi Pendidikan 3. Benchmarking Kebutuhan Taruna 4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Rp. 92.676.000,-
Layanan Manajemen Keuangan	1. Pelaksanaan Anggaran 2. Akuntansi dan Pelaporan	Rp. 26.428.000,-

6. Politeknik Imigrasi

Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi bidang imigrasi. Pada Tahun 2024 Poltekim menganggarkan pagu sebesar Rp 44.285.890.000,- untuk melaksanakan kegiatan pendidikan kedinasan bidang imigrasi.

Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Politeknik Imigrasi sesuai dengan fungsinya

Tabel 2.9 Rencana Kegiatan Poltekip

Layanan	Kegiatan	Anggaran
Layanan BMN	1. Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan BMN 2. Layanan Pengadaan BMN 3. Monitoring dan Evaluasi BMN 4. Layanan Urusan Kerumahtanggaan 5. Layanan Kesehatan	Rp. 24.204.000,-
Layanan Perkantoran	1. Pembayaran gaji dan tunjangan 2. Belanja Uang Lembur 3. Kendaraan Dinas Operasional 4. Langganan Daya dan Jasa 5. Pemeliharaan Peralatan Perkantoran 6. Keperluan Perkantoran 7. Pakaian Dinas 8. Pelantikan/Sumpah Jabatan 9. Koordinasi/Konsultasi 10. Honorarium Pengelola Keuangan 11. Pengiriman dan Pos 12. Kesehatan Pegawai 13. ATK dan Kebutuhan Lainnya 14. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 11.089.952.000,-
Layanan Sarana Internal	1. Perangkat Pengolah data dan Komunikasi 2. Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp. 430.330.000,-
Layanan Manajemen SDM	1. Administrasi Kepegawaian 2. Kegiatan Penelitian Ilmiah 3. Wisuda 4. Pelaksanaan Senat Akademik	Rp. 1.583.709.000,-
Pendidikan Taruna Tk I Politeknik Imigrasi	1. Pendidikan 2. Orientasi Lapangan 3. Seminar/Sosialisasi/Workshop/Kegiatan Sejenis 4. Pengabdian Masyarakat	Rp. 6.447.641.000,-
Pendidikan Taruna Tk II Politeknik Imigrasi	1. Pendidikan 2. Praktek Kerja Lapangan 3. Seminar/Sosialisasi/Workshop/Kegiatan Sejenis 4. Pengabdian Masyarakat	Rp. 6.845.008.000,-
Pendidikan Taruna Tk III Politeknik Imigrasi	1. Pendidikan 2. Kuliah Kerja Nyata 3. Seminar/Sosialisasi/Workshop/Kegiatan Sejenis 4. Pengabdian Masyarakat	Rp. 6.666.899.000,-
Pendidikan Taruna Tk IV Politeknik Imigrasi	1. Pendidikan 2. Kegiatan Magang 3. Penyegaraan Kesamaptaan dan Menembak 4. Seminar/Sosialisasi/Workshop/Kegiatan Sejenis	Rp.6.082.872.000,-

	5. Pengabdian Masyarakat	
Masa Basis Calon Taruna Politeknik Imigrasi	1. Kesamaptaan 2. Pembinaan Minat Bakat dan Tradisi Taruna 3. Pelantikan	Rp. 3.407.285.000,-
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1. Penyusunan Rencana Program	Rp. 1.565.000,-
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan 2. Benchmarking 3. Rapat Evaluasi Pendidikan 4. Supervisi Alumni 5. Kegiatan Monitoring Taruna PKL/KKN/Magang 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Rp. 914.988.000,-
Layanan Manajemen Keuangan **Layanan Reformasi Kinerja**	1. Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran 2. Peny 1. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Rp. 26.420.000,- Rp. 20.670.000,-

7. Balai Diklat Hukum dan HAM

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum yang berada di Jawa Tengah, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Berikut Anggaran dan wilayah kerja masing-masing Balai Diklat:

Tabel 2.10 Anggaran dan Wilayah Kerja Balai Diklat

No.	Balai Diklat	Anggaran	Wilayah Kerja
1.	Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau	Rp. 13.903.108.000,-	Kantor Wilayah : 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Sumatera Selatan 5. Riau 6. Kepualauan Riau 7. Jambi 8. Bangka Belitung

2.	Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	Rp. 13.366.666.000,-	Kantor Wilayah: 1. Jawa Tengah 2. D.I. Yogyakarta 3. Jawa Timur 4. Kalimantan Barat 5. Kalimantan Selatan 6. Kalimantan Tengah 7. Kalimantan Timur 8. Kalimantan Utara 9. Bali 10. Nusa Tenggara Barat 11. Nusa Tenggara Timur
3.	Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara	Rp. 11.919.497.000,-	Kantor Wilayah: 1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Utara 3. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Barat 6. Gorontalo 7. Maluku 8. Maluku Utara 9. Papua 10. Papua Barat

Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing Balai Diklat sesuai dengan fungsinya:

a. Balai Diklat Hukum Kep. Riau

Tabel 2.11 Rencana Kerja Balai Diklat Hukum Kep. Riau

No.	Fungsi	Anggaran
1.	**Layanan BMN** • Layanan Pengadaan BMN • Penatausahaan BMN	Rp. 30.000.000,-
2.	**Layanan Hubungan Masyarakat** • Publikasi dan Promosi	Rp. 58.370.000,-
3.	**Layanan Protokoler** • Koordinasi dan Pelaksanaan Keprotokoleran	Rp. 41.702.000,-
4.	**Layanan Umum** • Layanan Urusan Kerumahtanggaan • Layanan Kesehatan	Rp. 238.875.000,-
5.	**Layanan Perkantoran** • Pembayaran gaji dan tunjangan • Pemeliharaan Kendaraan Operasional • Langganan Daya Dan Jasa	Rp. 3.598.057.000,-

No.	Fungsi	Anggaran
	• Pemeliharaan Peralatan Perkantoran • Keperluan Perkantoran • Pakaian Dinas • Jamuan Tamu • Pelantikan / Sumpah Jabatan • Koordinasi Dan Konsultasi • Honor Pengelola Keuangan • Jasa dan Pos Giro • Pembelian Obat-obatan • Penanganan Covid-19 • Sewa Kendaraan dan Peralatan • Pemeliharaan Gedung Kantor dan Halaman	
6.	**Layanan Sarana Internal** • Kendaraan Bermotor • Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi • Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp. 1.213.238.000
7.	**Layanan Prasarana Internal** • Gedung dan bangunan	Rp. 247.444.000
8.	**Layanan Manajemen SDM** • Administrasi Kepegawaian • Pengembangan Mandiri Pegawai • In House Training Pengelolaan Website	Rp. 100.606.000,-
9.	**Layanan Pendidikan dan Pelatihan** • Penyusunan Program Pengembangan Kompetensi • Penguatan Program Pengembangan Kompetensi • Penyelenggaraan Pelatihan • Penyusunan Laporan dan Evaluasi	Rp. 7.759.811.000,-
10.	**Layanan Perencanaan dan Penganggaran** • Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran • Revisi Anggaran	Rp. 256.170.000,-
11.	**Layanan Pemantauan dan Evaluasi** • Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 79,944,000,-
12.	**Layanan Manajemen Keuangan** • Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran • Akuntansi dan Pelaporan	Rp. 127.546.000,-
13.	**Layanan Reformasi Kinerja** • Pencanangan Zona Integritas • Pembentukan Satker WBK/WBBM • Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi	Rp. 151.345.000,-

Sebagaimana tugas utama Balai Diklat adalah menyelenggarakan pelatihan di wilayah, berikut rencana pelatihan Balai Diklat Kep. Riau tahun 2024:

Tabel 2.12 Rencana Pelatihan Balai Diklat Hukum Kep. Riau

No	Pelatihan	Metode	Target
1	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar	Klasikal	80
2	Pelatihan Teknis Pemasyarakatan Pemeriksa Pelanggaran Tata Tertib	PJJ	80
3	Pelatihan Teknis Pembinaan Anak di LPKA	PJJ	80
4	Pelatihan Teknis Pemasyarakatan Latihan Kerja dan Produksi	PJJ	80
5	Pelatihan Teknik Pemasyarakatan Pengadministrasi Aplikasi SDP	PJJ	80
6	Pelatihan Teknis Kerjasama Keimigrasian Tingkat Dasar	PJJ	80
7	Pelatihan Teknis Keimigrasian Dokumen Fraud	Klasikal	80
8	Pelatihan Teknis Keimigrasian Pelayanan Dokumen Perjalanan	PJJ	80
9	Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara	PJJ	80
10	Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa (Barjas)	Blended	80
11	MOOC	PJJ	1350
12	Webinar	PJJ	-
13	Pelatihan Dasar CPNS	Blended	274
14	Pelatihan Manajemen Risiko	Klasikal	20
	Total		**659**

b. Balai Diklat Hukum Jawa Tengah

Tabel 2.13 Rencana Kerja Balai Diklat Hukum Jawa Tengah

No.	Fungsi	Anggaran
1.	**Layanan BMN** • Layanan Pengadaan BMN • Penatausahaan BMN	Rp. 54.016.000,-
2.	**Layanan Hubungan Masyarakat** • Publikasi dan Promosi	Rp. 22.791.000 ,-
14.	**Layanan Protokoler** • Koordinasi dan Pelaksanaan Keprotokoleran	Rp. 51.000.000 ,-
15.	**Layanan Umum**	Rp. 274.660.000 ,-

No.	Fungsi	Anggaran
	• Layanan Urusan Kerumahtanggaan • Layanan Kesehatan	
16.	**Layanan Kesehatan**	Rp. 86.600.000
17.	**Layanan Perkantoran** • Pembayaran gaji dan tunjangan • Uang Lembur • Pemeliharaan Kendaraan Operasional • Layanan Daya dan Jasa • Pemeliharaan Gedung Kantor, Pagar dan Halaman • Pemeliharaan Peralatan Kantor • Keperluan Perkantoran • Pakaian Dinas • Jamuan Tamu • Pelantikan/Sumpah Jabatan • Koordinasi dan Konsultasi • Honor Pengelola Keuangan • Pengiriman dan Pos • Pembelian Obat-Obatan • Penanganan Covid • Sewa Kendaraan dan Peralatan	Rp. 5.125.850.000,-
18.	**Layanan Sarana Internal** • Kendaraan Bermotor • Perangkat Pengolah data dan Komunikasi • Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp. 466.845.000,-
19.	**Layanan Prasarana Internal** • Gedung dan Bangunan	Rp. 347.756.000,-
20.	**Layanan Manajemen SDM** • Administrasi Kepegawaian • Pengembangan Mandiri Pegawai • Pembinaan Mental, Fisik dan Penguatan Disiplin Pegawai	Rp. 430.920.000,-
21.	**Layanan Pendidikan dan Pelatihan** • Perencanaan Pengembangan Kompetensi • Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi • Penyusunan Laporan dan Evaluasi	Rp. 6.373.373.000,-
22.	**Layanan Perencanaan dan Penganggaran** • Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran • Revisi Anggaran	Rp. 71.862.000 ,-

No.	Fungsi	Anggaran
23.	**Layanan Pemantauan dan Evaluasi** • Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	Rp. 47.155.000 ,-
24.	**Layanan Manajemen Keuangan** • Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran • Penyusunan Laporan Keuangan	Rp. 56.470.000 ,-
25.	**Layanan Reformasi Kinerja** • Administrasi Pembangunan ZI dan Pengelolaan SPIP • Pembentukan Satker WBK/WBBM • Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi	Rp. 42.968.000,-
26.	**Layanan Penyelenggaraan Kearsipan** • Pengelolaan Arsip dan Persuratan • Pengelolaan Perpustakaan	Rp. 1.000.000,-

Sebagaimana tugas utama Balai Diklat adalah menyelenggarakan pelatihan di wilayah, berikut rencana pelatihan Balai Diklat Jawa Tengah tahun 2024:

Tabel 2.14 Rencana Pelatihan Balai Diklat Hukum Kep. Riau

No	Pelatihan	Metode	Target
1.	Pelatihan Administrasi Kepegawaian (PJJ)	PJJ	80
2.	Pelatihan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Klasikal	40
3.	Pelatihan Bahasa Isyarat	Klasikal	40
4.	Pelatihan Kesamaptaan dan Bela Negara	Klasikal	40
5.	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar	Klasikal	40
6.	Pelatihan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Klasikal	40
7.	Pelatihan Teknis Legal Drafting / Perancangan Peraturan PerUU	Klasikal	40
8.	Pelatihan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)	PJJ	80

9.	Pelatihan Kehumasan dan Corporate Branding	Klasikal	80
10.	Pelatihan Teknis Pemasyarakatan Assesment dan Klasifikasi WBP	Klasikal	40
11.	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tk Dasar	PJJ	80
12.	Pelatihan Teknis Keimigrasian Sistem Pengamanan Data dan Sistem Informasi Keimigrasian	Klasikal	40
14.	Pelatihan LKJIP	Klasikal	40
15.	Pelatihan SPIP-MR	Klasikal	40
16.	Pelatihan Dasar CPNS	Blended Learning	395
17.	Pelatihan Kehumasan Desain Grafis dan Fotografi	Klasikal	40
20.	Webinar / Community of Practice / Sosialisasi / Bimtek / Workshop/MOOC		10782
Total			**11.977**

c. Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Tabel 2.15 Rencana Kerja Balai Diklat Hukum Sulawesi Utara

No.	Fungsi	Anggaran
1.	**Layanan BMN** • Layanan Pengadaan BMN • Penatausahaan BMN	Rp. 27.107.000,-
2.	**Layanan Hubungan Masyarakat** • Publikasi dan Promosi	Rp. 43.427.000,-
3.	**Layanan Protokoler** • Koordinasi dan Pelaksanaan Keprotokoleran	Rp. 55.351.000,-
4.	**Layanan Umum** • Layanan Urusan Kerumahtanggaan • Layanan Kesehatan	Rp. 169.629.000,-
5.	**Layanan Kesehatan**	Rp. 29.984.000
6.	**Layanan Perkantoran** • Pembayaran gaji dan tunjangan	Rp. 3.041.512.000,-

No.	Fungsi	Anggaran
	• Uang Lembur • Pemeliharaan Kendaraan Operasional • Layanan Daya dan Jasa • Pemeliharaan Gedung Kantor, Pagar dan Halaman • Pemeliharaan Peralatan Kantor • Keperluan Perkantoran • Pakaian Dinas • Jamuan Tamu • Pelantikan/Sumpah Jabatan • Koordinasi dan Konsultasi • Honor Pengelola Keuangan • Pengiriman dan Pos • Penanganan Covid • Sewa Kendaraan • Biaya Komunikasi	
7.	**Layanan Sarana Internal** • Kendaraan Bermotor • Perangkat Pengolah data dan Komunikasi • Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp. 1.300.080.000,-
8.	**Layanan Manajemen SDM** • Administrasi Kepegawaian • Pengembangan Mandiri Pegawai • Bimtek Kearsipan • Bimtek Kepegawaian • Workshop Public speaking dan jurnalis • Pembinaan Mental, Fisik dan Penguatan Disiplin Pegawai	Rp. 255.103.000,-
9.	**Layanan Pendidikan dan Pelatihan** • Perencanaan Pengembangan Kompetensi • Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi • Penyusunan Laporan dan Evaluasi	Rp. 6.633.305.000,-
10.	**Layanan Perencanaan dan Penganggaran** • Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran • Revisi Anggaran	Rp. 132.780.000,-
11.	**Layanan Pemantauan dan Evaluasi** • Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	Rp. 114.345.000,-
12.	**Layanan Manajemen Keuangan** • Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran • Penyusunan Laporan Keuangan	Rp. 92.453.000,-
13.	**Layanan Reformasi Kinerja** • Pembentukan Satker WBK/WBBM	Rp. 78.256.000,-

No.	Fungsi	Anggaran
14.	**Layanan Penyelenggaraan Kearsipan** • Pengelolaan Arsip dan Persuratan • Pengelolaan Perpustakaan	Rp. 6.229.000,-

Sebagaimana tugas utama Balai Diklat adalah menyelenggarakan pelatihan di wilayah, berikut rencana pelatihan Balai Diklat Sulawesi Utara tahun 2023:

Tabel 2.16 Rencana Pelatihan Balai Diklat Hukum Sulawesi Utara

No	Pelatihan	Metode	Target
1	Pelatihan Kehumasan	Klasikal	30
2	Pelatihan Teknis Pelayanan Pengadministrasian Aplikasi SDP	PJJ	40
3	Pelatihan Teknis Latihan Kerja dan Kegiatan Kerja Produksi	Klasikal	40
4	Pelatihan Teknis Intelijen Dasar Keimigrasian	Klasikal	40
5	Pelatihan Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi	PJJ	80
6	Pelatihan Protokoler	PJJ	80
7	Pelatihan Strategi dan Teknik Membangun Publikasi Pelayanan	PJJ	74
8	Pelatihan Kerjasama Keimigrasian	PJJ	80
11	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar	Klasikal	40
12	Pelatihan Teknis Pelayanan Anak di LPKA	Klasikal	40
13	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Live Support (BTCLS)	Klasikal	25
14	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Lanjutan	PJJ	30
15	Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tk. Dasar	PJJ	80
16	Pelatihan Pengelolaan BMN	PJJ	30
17	Pelatihan Dasar CPNS	Blended learning	140

No	Pelatihan	Metode	Target
18	Pelatihan Pembentukan Kedisiplinan Pemasyarakatan (Kesamaptaan)	Klasikal	40
19	Pelatihan teknis pelayanan anak	PJJ	40
20	Pelatihan Pembentukas Kedisiplinan (Kesamaptaan) WIlayah Sulawesi Utara	Klasikal	40
21	Webinar Kepegawaian (Pengembangan Karir PNS)		1412
22	MOOC		1031
Total			**3.559**

C. Rencana Penyerapan Anggaran

Berikut rencana penyerapan anggaran (*Disbursement plan*) BPSDM Hukum dan HAM

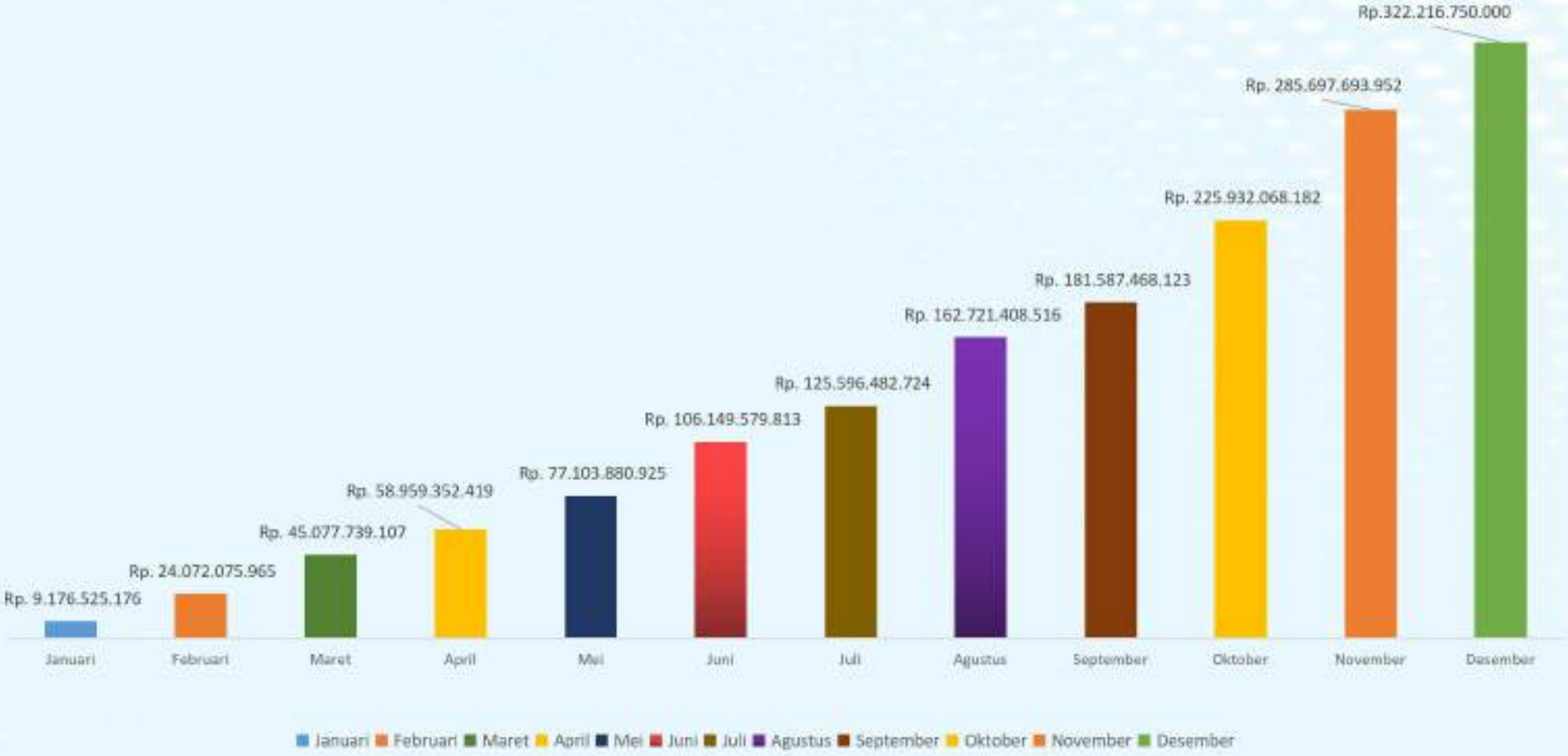

03 BAB III PELAKSANAAN KINERJA

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang manifestasi dari pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan serta dapat di pertanggungjawabkan, yang meliputi pencapaian target dan implementasi kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPSDM Hukum disertai dengan permasalahan yang dihadapi oleh BPSDM Hukum pada Tahun 2024.

A. Capaian Kinerja

Pada tahun anggaran 2024, BPSDM Hukum sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum telah menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan pelatihan baik pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan maupun pelatihan fungsional dan HAM dengan output pelatihan sebanyak 366.247 pegawai di bidang Hukum dan HAM melalui berbagai metode pembelajaran yaitu klasikal (tatap muka langsung), pembelajaran jarak jauh (PJJ), MOOC (*Massive Open Online Course), Webinar* dan *e-learning*. Selain melakukan kegiatan pengembangan pegawai, BPSDM Hukum dan HAM juga melakukan penilaian dan pemetaan kompetensi kepada 5.520 pegawai.

Disamping menyelenggarakan pengembangan pegawai bagi aparatur di bidang hukum dan hak asasi manusia, BPSDM Hukum juga menyelenggarakan Pendidikan Kedinasan yang mencetak SDM yang memiliki kompetensi di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Melalui Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM), BPSDM Hukum menyelenggarakan Pendidikan Kedinasan yang mencetak SDM yang memiliki kompetensi di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Jumlah taruna saat ini yang sedang mengikuti pendidikan kedinasan sebanyak adalah 2.521 taruna dengan 1.312 orang merupakan taruna Poltekip dan 1.209 orang merupakan taruna Poltekim.

Tabel 3.1 Capaian Output Kegiatan

No	Satuan Kerja	Bentuk Kegiatan					
		Pelatihan Klasikal	Pelatihan Non-Klasikal	Penkom	Pendidikan	Webinar	Total
1	Pusbanglat Tekpim	3.724	43.186	-	-	153.811	200.721
2	Pusbanglat Fungham	802	595	-	-	139.859	141.256
3	Puspenkom	-	-	5.520	-		5.520
4	Poltekip	-	-	-	1.312		1.312

5	Poltekim	-	--	-	1.209		1.209
6	Badiklat Sulut	531	1.595	-	-	1.412	3.538
7	Badiklat Jateng	875	2.555	-	-	6.260	9.690
8	Badiklat Kepri	573	1.250	-	-	6.708	8.531
	Total	**12.822**	**128.277**	**15.925**	**2.520**		**371.777**

Adapun dari sisi anggaran pada sampai dengan akhir tahun 2024 BPSDM Hukum dan HAM telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 306.714. 468.080,- atau 96,30% dari pagu yang dikelola sebesar Rp. 318.472.072.000,- untuk pelaksanaan tugas fungsi BPSDM Hukum dan HAM yang diimplementasikan ke dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM
2. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM
5. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIM)
6. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIP)
7. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Jateng)
8. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Kepri)
9. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Sulut)

Berikut data penyerapan BPSDM Hukum dan HAM per kegiatan sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian kegiatan dalam rangka pemenuhan capaian sasaran strategis dan sasaran program yang menjadi tanggung jawab BPSDM Hukum dan HAM.

Berikut tabel realisasi anggaran per belanja dan realisasi anggaran tahun 2024 pada masing-masing satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM :

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Per Belanja

Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	38.890.130.000,-	38.274.042.991,-	98,42
Belanja Barang	193.788.113.000,-	185.162.491.468,-	95,55
Belanja Modal	89.538.507.000,-	88.551.244.604,-	98,90

Sumber : monev.kemenkeu Ditjen Anggaran

Grafik 3.1 Realisasi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja

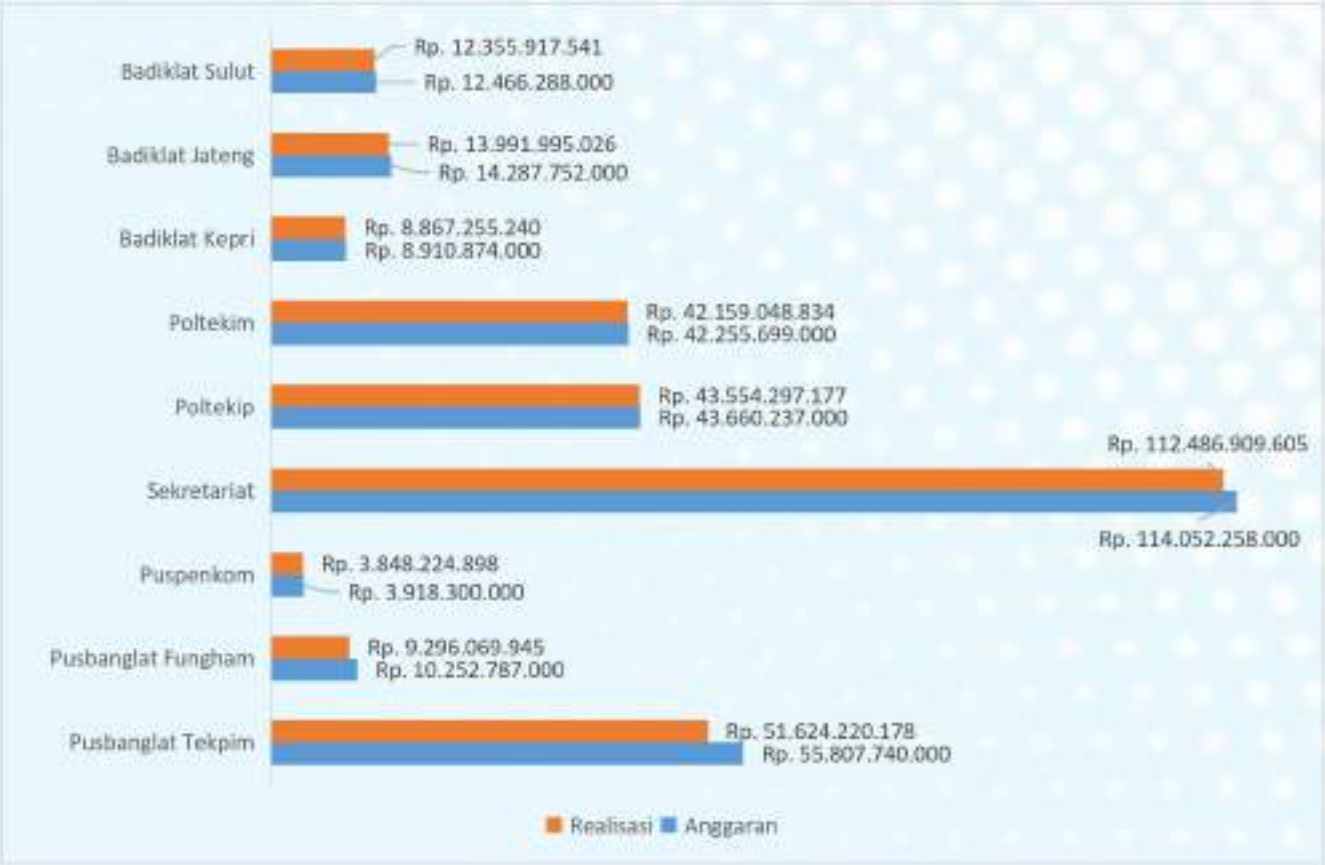

Berikut capaian kinerja pada satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum tahun anggaran 2024:

1. Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional memiliki tugas menyelenggarakan pelatihan fungsional dan HAM. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka perlu diselenggarakan fungsi Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Pelaporan pelatihan fungsional dan HAM. Berikut rincian capaian kinerja dan kegiatan pada masing-masing fungsi tersebut:

Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pelatihan Fungsional dan HAM pada Tahun 2024 melaksanakan beberapa kegiatan penyusunan kurikulum dan modul, serta workshop. Berikut rincian kegiatan perencanaan pelatihan Fungsional dan HAM:

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja dan Anggaran Perencanaan

Kegiatan	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan Fungsional dan HAM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.246.628.000	1.238.253.586

Kegiatan	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2. Penyusunan Modul Penjenjangan Pelatihan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
3. Penyusunan Kurikulum Penjenjangan Pelatihan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
4. Penyusunan Materi MOOC Pembimbing Kemasyarakatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
5. FGD Penguatan Pengelolaan Media Sosial bagi Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional dan HAM	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Persentase Capaian (%)	**100%**		**99%**	

Berdasarkan tabel diatas, Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional telah melaksanakan 5 kegiatan perencanaan pelatihan pada tahun 2024 yang berarti bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga realisasi kegiatan perencanaan pelatihan mencapai 100%. Dari sisi anggaran, realisasi kegiatan perencanaan pelatihan mencapai 99% atau sebesar Rp. 1.238.253.586,- dari yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp. 1.246.628.000,-.

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia juga telah melaksanakan tugas penyelenggaraan pengembangan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia pada tahun 2024. Berikut capaian pelaksanaan kegiatan pelatihan pada tahun 2024:

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Anggaran Penyelenggaraan

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target (RKAKL)	Realisasi	Target	Realisasi
Penyelenggaraan Diklat di Bidang Fungsional dan HAM	14 Pelatihan	14 Pelatihan	4.301.061.000	4.209.088.103
Jumlah Lulusan Diklat di Bidang Fungsional dan HAM	136.433 Orang	140.762 Orang		
Penyelenggaraan Diklat di	8	8 Pelatihan	2.713.360.000	2.631.124.267

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target (RKAKL)	Realisasi	Target	Realisasi
Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	Pelatihan			
Jumlah Lulusan Diklat di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	320 Orang	319 Orang		
Total	**136.753 Orang**	**141.081 Orang**	**7.014.421.000**	**6.840.212.370**
Persentase Capaian (%)	**96.71**		**97.51**	

Berikut rincian dan waktu pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM tahun anggaran 2024:

Tabel 3.5 Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional dan HAM

No	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Output	Keterangan
Penyelenggaraan Diklat di Bidang Fungsional dan HAM				
1	Analis Hukum	Juni - Oktober	89	3 Angkatan/ 13 Mei-28 Juni 2024
2	ACLS	19 Februari - 24 Februari	30	1 Angkatan/PJJ
3	Pengamanan pemasyarakatan	Juli - November	120	3 Angkatan/PJJ
4	Pranata Komputer	13 Mei-28 Juni	25	1 Angkatan/ *Blended*
5	Penjenjangan Auditor	21 Mei - 5 Juli 2024	10	1 Angkatan/ *Blended*
6	Penjenjangan Auditor	9 Juli - 13 Agustus 2024	12	1 Angkatan/ *Blended*
7	Pembentukkan Pengelola Barjas	19-27 Maret 2024	25	1 Angkatan/*Blended*
8	Penjenjangan Pengelola Barjas	20 Juni – 1 Oktober	30	1 Angkatan/PJJ
9	Penyuluh Hukum	23 April - 22 Mei	26	1 Angkatan/ Klasikal

No	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Output	Keterangan
10	Penyuluh Hukum	23 September-30 Oktober	29	1 Angkatan/ Klasikal
11	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Februari – Oktober	111	2 Angkatan/PJJ & 2 Angkatan Klasikal
12	*Training of Trainer* Analis Hukum	21-27 Februari	29	1 Angkatan/ Klasikal
13	Webinar Series	Agustus - Oktober	139.859	2 Hybrid dan 1 Daring
14	Massive Open Online Course (MOOC) HAM	25 - 29 November	367	1 Angkatan/ MOOC
Penyelenggaraan Diklat di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan				
15	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Akt. 55	AKT LV: 24 April-12 Juli 2024	40	*Blended*
16	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Akt. 56	AKT LVI: 20 Juni - 3 Sep	40	*Blended*
17	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Metode Blended Learning Akt.IV	AKT IV: 19 Februari-24 April 2024	39	*Blended*
18	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Metode Blended Learning Akt.V	AKT V: 22 April-26 Juni 2024	40	*Blended*
19	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Metode Blended Learning Akt.VI	AKT VI: 10 Juni-31 Juli	40	*Blended*
20	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Metode Blended Learning Akt.VII	AKT VII: 24 Juli-11 September 2024	40	*Blended*
21	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Metode Blended Learning Akt.VIII	AKT VIII: 27 Agustus – 16 Oktober 2024	39	*Blended*

No	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Output	Keterangan
22	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Metode Blended Learning Akt.IX	AKT IX: 9 Oktober - 29 November 2024	41	*Blended*
	Total		**141.081 orang**	

Penyusunan laporan dan evaluasi Pengembangan Kompetensi Pelatihan Fungsional dan HAM pada Tahun 2024 telah melaksanakan beberapa kegiatan evaluasi dan pelaporan, serta evaluasi pasca pelatihan. Berikut rincian kegiatan Penyusunan laporan dan evaluasi Fungsional dan HAM:

Tabel 3.6 Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional dan HAM

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target (RKAKL)	Realisasi	Target	Realisasi
Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan Fungsional dan HAM	13 Pelatihan	13 Pelatihan	950.839.000	888.794.450
Evaluasi Pasca Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan UU dan Penyuluh Hukum dan Analis Hukum	8 Kegiatan	8 Kegiatan		
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	8 Pelatihan	8 Pelatihan		
Total	**21 Pelatihan**	**21 Pelatihan**	950.839.000	888.794.450
Persentase Capaian (%)	**100**		**97.51**	

2. Pusat Penilaian Kompetensi

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan akhir tahun 2023, Pusat Penilaian Kompetensi telah menyelenggarakan fungsi Perencanaan, Penyelenggaraan, Evaluasi Penilaian Kompetensi dan Dukungan Sistem Informasi BPSDM Hukum dan HAM. Berikut rincian pelaksanaan masing-masing fungsi tersebut.

Penilaian Kompetensi pada tahun 2024 melaksanakan beberapa kegiatan perencanaan dan evaluasi penilaian kompetensi. Kegiatan perencanaan dan evaluasi penilaian kompetensi secara rinci antara lain:

Tabel 3.7 Realisasi Kinerja dan Anggaran Perencanaan dan Evaluasi

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyusunan Rencana Program Penilaian Kompetensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	707.837.000	704.724.959
FGD Pra Re-Akreditasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Evaluasi Norma Tes Potensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Persentase Capaian (%)	**100**		**99**	

Berdasarkan tabel diatas, Bidang Program telah melaksanakan 4 kegiatan pada Tahun 2024 yang berarti bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga realisasi kegiatan perencanaan dan evaluasi penilaian kompetensi penilaian kompetensi mencapai 100%. Dari sisi anggaran, realisasi Bidang Program mencapai 99% atau sebesar Rp.704.724.959,- dari yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp. 707.837.000,-.

Dari sisi fungsi penyelenggaraan penilaian kompetensi, pada tahun 2024 Pusat Penilaian Kompetensi telah telah melaksanakan uji kompetensi kepada 6.026 Aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Jumlah tersebut sangat jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu 14.520 orang. Adapun realisasi penyerapan anggaran penyelenggaraan penilaian kompetensi pada tahun 2024 sebesar 98% atau Rp.3.286.452.311,- dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM hukum dan HAM sebesar Rp.3.331.975.000,-. Berikut rincian capaian pelaksanaan penilaian kompetensi pada tahun anggaran 2024:

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja dan Anggaran Penyelenggaraan

Kegiatan	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	500 Orang	508 Orang	2.162.424.000	2.137.543.587
Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Kenaikan Jenjang Bagi	400 Orang	831 Orang		

Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM				
Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Non DIPA)	0	620		
Penilaian Preferensi Kompetensi dengan Metode Online	13.620 Orang	3.558 Orang		
Penilaian Kompetensi dilingkungan Badan Strategi Keibjakan Hukum dan HAM	0	3 Orang		
Total	**14.520 Orang**	**5.520 Orang**		
Persentase Capaian (%)			**99**	

Tabel 3.9 Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi

No	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Target	Output	Alat Ukur
Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM					
1.	Kantor Wilayah Aceh	28 - 29 Februari	*500*	508	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
2.	Kantor Wilayah Bali	21 - 22 Februari			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
3.	Kantor Wilayah Lampung	5 - 6 Maret			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, Presentasi
4.	Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	23 – 24 April			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
5.	Kantor Wilayah Kalimantan Timur	23 - 24 April			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural,

No	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Target	Output	Alat Ukur
					Analisa Kasus, LGD
6.	Kantor Wilayah Riau	14 - 15 Mei			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
7.	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan	14 - 15 Mei			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
8.	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024	22 Februari			
Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Kenaikan Jenjang Bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM					
9.	Penilaian Kompetensi melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2024	27 - 28 Februari	400	*831*	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
10.	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan Fungsional dilingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM	27 - 31 Mei			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
11.	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan	20 - 22 Mei			Tes Potensi,

No	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Target	Output	Alat Ukur
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024				Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
12.	Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Kenaikan Jenjang Jabatan dan Perpindahan dari Jabatan Lain Bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2024	12 – 14 Juni			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, Presentasi
13.	Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Kenaikan Jenjang dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Tahun 2024	10 – 12 Juli			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
14.	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum di Lingkungan BPHN	16 – 17 Desember			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
15.	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan	11 – 13 Desember			Tes Potensi, Wawancara

No	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Target	Output	Alat Ukur
	Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan di Lingkungan Ditjen Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2024				Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (NON DIPA)					
16.	Penilaian Kompetensi Perpindahan Jabatan dari Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi ke Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Ham RI	20 – 21 Maret	0	*620*	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD, Proposal Writing
17.	Penilaian Kompetensi Bagi Penugasan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	25 – 26 April			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD, CBT Teknis
18.	Penilaian Kompetensi Bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	20 – 21 Juni			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, Presentasi, LGD
19.	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Ahli Utama Di	18 – 20 September			Tes Potensi, Wawancara

No	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Target	Output	Alat Ukur
	Lingkungan Direktorat Jenderal Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta				Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
20.	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2024	22 – 25 Oktober			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
21.	Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Pengisian Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama dan Analis Keimigrasian Ahli Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024	28 - 29 Oktober			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, Presentasi, LGD
22.	Penilaian Kompetensi Perpindahan Dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024	28 - 29 Oktober			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, Presentasi

No	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Target	Output	Alat Ukur
23.	Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Kenaikan Jenjang di Lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional TA 2024	13 – 15 November			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
24.	Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Pemetaan Kompetensi di Lingkungan Inspektorat Jenderal TA 2024				Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD, Presentasi dan In Tray
25.	Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Perpindahan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2024				Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus/Presentasi Teknis,LGD, CBT Teknis
26.	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Pemeriksa Paten dan Pembimbing Kemasyarakatan Tahun 2024	20 – 22 November			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
27.	Penilaian Kompetensi di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM	16 – 17 Desember			Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus
Penilaian Preferensi Kompetensi dengan Metode Online					
28.	Penilaian Preferensi Kompetensi Dengan Metode Online	12-16 Agustus	13.620	3.558	
Penilaian Potensi					
29.	Penilaian Kompetensi	19 Februari	0		Situational JudgementTest

No	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Target	Output	Alat Ukur
	dilingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM			3	Online
Total			14.520	5.520	

Selain menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Penilaian Kompetensi juga menyelenggarakan dukungan sistem informasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Berikut capaian kegiatan pada pelaksanaan fungsi dukungan sistem informasi pada Pusat Penilaian Kompetensi:

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja dan Anggaran Sistem Informasi

Kegiatan	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Tata kelola data dan informasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	461.714.000	456.751.091
2. Penyusunan Dokumen Cetak Biru Aplikasi Tes Potensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
3. Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola Sistem Informasi Dalam Tata Kelola Layanan TI	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
4. Evaluasi Teknis Sistem Aplikasi Dan Jaringan Internet Tahun 2024	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
5. Penyusunan Cetak Biru Optimalisasi Sistem Informasi Penilaian Kompetensi Dan Pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
6. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi Di Lingkungan Bpsdm Hukum Dan Ham	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Persentase Capaian (%)	**100**		**99**	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang Sistem Informasi dan jaringan pada tahun 2024 melaksanakan 6 kegiatan yang menjadi target pada Bidang Sistem dan Informasi yang telah ditetapkan sehingga dari data tersebut diperoleh hasil capaian kinerja Bidang Sistem Informasi dan Jaringan sebesar 100%. Adapun realisasi

penyerapan anggaran Bidang Sistem Informasi dan Jaringan pada tahun 2024 sebesar 99% atau Rp. 456.751.091,- dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM hukum dan HAM sebesar Rp. 461.714.000,-.

3. Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

Sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang memiliki tugas menyelenggarakan pelatihan teknis dan kepemimpinan bagi aparatur Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi fungsinya yaitu perencananaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaporan pelatihan teknis dan kepemimpinan. Berikut rincian capaian kinerja dan kegiatan pada masing-masing fungsi tersebut.

Berdasarkan hasi pemantauan kinerja tahun 2024, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan telah menyelenggarakan fungsi perencanaan pelatihan teknis dan kepemimpinan yang dimplementasikan ke dalam beberapa kegaitan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Kinerja dan Anggaran Perencanaan

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Penyiapan Dokumen Rencana Kegiatan Dan Kebijakan Diklat Teknis dan Kepemimpinan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.284.308.000	1.171.830.792
2. Penyusunan Pedoman Sistematika Laporan Pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
3. Penyusunan Kurikulum dan RBPP RBPMP Pelatihan Teknis Pemasyarakatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
4. Penyusunan Modul Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
5. Penyusunan Modul Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Lanjutan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Persentase Capaian (%)	100		98	

Berdasarkan tabel diatas, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan telah melaksanakan 5 kegiatan perencanaan pelatihan teknis dan kepemimpian yang berarti bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga realisasi kegiatan Bidang Program mencapai 100%. Dari sisi anggaran, realisasi Bidang Program mencapai 98% atau sebesar Rp. 1.171.830.792,- dari yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp. 1.284.308.000,-.

Dari fungsi penyelenggaran pelatihan teknis dan kepemimpinan Pusat Pengembang Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan pada Tahun 2024 menyelenggarakan diklat sebanyak 42 pelatihan dengan menggunakan Anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM maupun PNBP dari Unit Eselon I lainnya. Penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan menggunakan metode klasikal, metode *e-learning* maupun dengan metode *Massive Open Online Course* (MOOC) tersebut sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga hasil capaian kinerja Bidang Penyelenggaraan di Tahun 2024 mencapai 99% yang berasal dari 30 pelatihan di Bidang Teknis dan Kepemimpinan, 9 pelatihan di Bidang SPPA serta 3 pelatihan dengan DIPA dari Ditjen Imigrasi dengan jumlah lulusan diklat sebanyak **201.034** orang, dengan rincian sebagain berikut:

- 200.091 orang telah lulus mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di bidang Teknis dan Kepemimpinan;
- 270 orang telah lulus mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di bidang pelatihan terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum
- 360 orng telah lulus mengikuti pelatihan dengan anggaran DIPA Ditjen Imigrasi

Adapun realisasi penyerapan anggaran penyelenggaraan pelatihan pada Tahun 2024 sebesar 96% atau Rp. **12.978.097.767**,- dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2024 sebesar Rp. **13.688.202.000**,-. Informasi lebih lengkap tentang capaian output pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.12 Realisasi Kinerja dan Anggaran Penyelenggaraan

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target (RKAKL)	Realisasi	Target	Realisasi
Penyelenggaraan Diklat di Bidang Teknis dan Kepemimpinan	30 Pelatihan	30 Pelatihan	10.981.542.000	10.488.283.889
Jumlah Lulusan Diklat di Bidang Teknis dan	181.312 Orang	200.091 Orang		

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target (RKAKL)	Realisasi	Target	Realisasi
Kepemimpinan				
Penyelenggaraan Diklat di Bidang SPPA	9 Pelatihan	9 Pelatihan	2,706,660,000	2,490,325,878
Jumlah Lulusan Diklat di Bidang SPPA	270 Orang	270 Orang		
Penyelenggaraan Pelatihan PNBP Imigrasi	3 Pelatihan	3 Pelatihan	-	-
Jumlah lulusan pelatihan PNBP Imigrasi	360 orang	360 orang	-	-
Total	**181.942 Orang**	**200.721 Orang**	**13.688.202.000**	**12.978.097.767**
Persentase Capaian (%)	**100,7**		**96**	

Tabel 3.13 Penyelenggaran Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

No	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Output	Keterangan
Penyelenggaraan Diklat di Bidang Teknis dan Kepemimpinan				
1	Pelatihan Dasar CPNS bagi alumni Poltekip dan Poltekim	April – September 2024	595	*Blended Learning*
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	7 Mei - 12 Desember 2024	80	*Blended Learning*
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Mei – November 2024	40	*Blended Learning*
4	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	28 Agustus - 20 Desember 2024	60	Klasikal
5	Pelatihan Dasar CPNS Umum	3 September – 7 Desember	199	Klasikal
6	Orientasi Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	7 – 25 Oktober 2024	874	PJJ
7	Pendidikan Khusus Keimigrasian bagi Lulusan Program D-IV (Diploma-Empat) Politeknik Imigrasi	21 Juni – 8 Juli 2024	289	PJJ

No	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Output	Keterangan
8	Pelatihan Assesment Resiko dan Klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan	Maret – Agustus 2024	199	PJJ
9	Pelatihan Manajemen Resiko	19 – 23 Februari 2024	30	Klasikal
10	Pelatihan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Februari – Maret 2024	160	PJJ
11	Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian	29 Juli - 13 Agustus 2024	30	PJJ
12	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)	15 – 20 Juli 2024	20	PJJ
13	Massive Open Online Course (MOOC) Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar	21 Februari - 30 Juni 2024	19.054	PJJ
14	Massive Open Online Course (MOOC) Pelayanan Publik Tingkat Dasar	25 Maret - 17 Mei 2024	3.426	PJJ
15	Massive Open Online Course (MOOC) Manajemen Resiko	17 Oktober - 25 November 2024	2.895	PJJ
16	Massive Open Online Course (MOOC) Pendaftaran Merk	17 Oktober - 25 November 2024	1.603	MOOC
17	Massive Open Online Course (MOOC) Penyelenggaraan Pengawasan	17 Oktober - 25 November 2024	2.498	MOOC
18	Massive Open Online Course (MOOC) Perseroan Perorangan	17 Oktober - 25 November 2024	1.604	MOOC
19	Massive Open Online Course (MOOC) Sipkumham	17 Oktober - 25 November 2024	2.333	MOOC
20	Massive Open Online Course (MOOC) Tentang Imigrasi	20 Juni – 31 Juli 2024	7.284	MOOC
21	Massive Open Online Course (MOOC) Best Practice Keimigrasian	20 Juni – 31 Juli 2024	790	MOOC
22	Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (Prestasi)	14 Mei – 25 Oktober 2024	1.945	MOOC

No	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Output	Keterangan
23	Webinar Series	Agustus – Oktober 2024	153.811	MOOC
24	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Level1 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	18 November – 5 Desember 2024	8	MOOC
25	Certified Risk Management Officer (CRMO)	18 – 25 November 2024	8	MOOC
26	Pelatihan Audit Investigatif Level 1	14 – 18 Oktober 2024	13	MOOC
27	Pelatihan Forensic dan Data Analytic	11 – 15 November 2024	25	Klasikal
28	Pelatihan Coaching dan Mentoring	10 - 21 Oktober 2024	177	MOOC
29	Impactfull Communication Skills Offline Training	13 – 15 Desember 2024	40	MOOC
30	Pendidikan Khusus Keimigrasian Bagi Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal Imigrasi	18 Oktober 2024	1	Klasikal
Penyelenggaraan Diklat di Bidang SPPA				
36	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan I	13 - 27 Maret 2024	30	Klasikal
37	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan II	26 Juni - 10 Juli 2024	30	Klasikal
38	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan III	10 – 24 Juli 2024	30	Klasikal
39	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan IV	31 Juli – 14 Agustus 2024	30	Klasikal
40	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan V	21 Agustus – 4 Septemebr 2024	30	Klasikal
41	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan VI	19 September - 3 Oktober 2024	30	Klasikal
42	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan VII	9 – 23 Oktober 2024	30	Klasikal
43	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan VIII	30 Oktober – 13 November 2024	30	Klasikal
44	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan IX	3 – 17 Desember 2024	30	Klasikal
Penyelenggaraan Pelatihan PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi				
45	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS	22 April – 25 Oktober 2024	150	Klasikal (5 Angkatan)

No	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Output	Keterangan
46	Pelatihan Intelejen Dasar Direktorat Jenderal Imigrasi	23 April – 13 November 2024	150	Klasikal (5 Angkatan)
47	Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Deteni Direktorat Jenderal Imigrasi	21 April – 20 Mei 2024	60	Klasikal
Total			**200.721**	

4. Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM

Capaian kegiatan bagian Sekretariat pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.14 Realisasi Kegiatan Sekretariat

No	Bagian	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Program dan Pelaporan	Penyusunan RKA-K/L Tahun 2024	Terlaksananya supervisi penyusunan RKA-K/L Tahun 2024	1 Dokumen
		Revisi RKAKL Tahun 2023	- Revisi DIPA : 11 Kali - Reivisi POK : 9 Kali	20 Dokumen
		Supervisi Penyusunan RKAKL Badiklat	Badiklat Jateng : 1 kali Badiklat sulut 2 kali Badiklat Kepri 1 Kali	4 Dokumen
		Analisa Kebutuhan Anggaran 2026	Tersusunnya dokumen Analisas Kebutuhan Anggaran BPSDM 2026	1 Dokumen
		Sosialiasasi Paradigma Baru *Corporate University*	Terlaksananya Sosialiasasi Paradigma Baru *Corporate University*	7 Dokumen
		Supervisi dan Monitoring Kinerja BPSDM	Terlaksananya Supervisi dan Monitoring Kinerja BPSDM	1 Dokumen
		FGD Paradigma Baru *Corporate University*	Terlaksananya FGD Paradigma Baru *Corporate University* Oktober 2024 di BPSDM Hukum dan HAM	1 Dokumen
		Percepatan kinerja Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM	Terlaksananya Rapat Koordinasi Akselerasi Pengembangan Kompetensi pada tanggal 6 s.d 8 November 2024 di Hotel Mercure Batavia Jakarta	1 Dokumen
		Administrasi Penyusunan	Terlaksananya layanan administrasi penyusunan evaluasi dan pelaporan	1 layanan

No	Bagian	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian
		Evaluasi dan Pelaporan		
		FGD Penyusunan Manajemen Risiko BPSDM Hukum dan HAM	Terlaksananya FGD Penyusunan Manajemen Risiko BPSDM Hukum dan HAM TA. 2024 pada tanggal 12-14 Juni 2024 di hotel Sahid Jakarta	1 Dokumen
		Kegiatan Internalisasi Nilai Pancasila dan Peningkatan Kedisiplinan Pegawai BPSDM Hukum Dan HAM	Terlaksananya Kegiatan Internalisasi Nilai Pancasila dan Peningkatan Kedisiplinan Pegawai BPSDM Hukum Dan HAM (Kegiatan Fisik Mental dan Disiplin (FMD))	1 Dokumen
		Administrasi Kelembagaan	Pelaksanaan Administrasi Kelembagaan	1 layanan
		Restrukturisasi Kelembagaan Politeknik	Terlaksananya FGD restrukturisasi kelembagaan penggabungan Politeknik pada 13 s.d 16 Agustus 2024 pada Hotel *Gran Melia* Jakarta	1 Dokumen
		Supervisi Kelembagaan	Badiklat Sulawesi Utara 21-23 Agustus Badiklat Kepulauan Riau 28-30 Agustus Badiklat Jawa Tengah 4-6 September	3 Dokumen
		Administrasi Fasilitas Reformasi Birokrasi, Spip, Pembangunan ZI, WBK dan WBBM	Terselenggaranya layanan administrasi fasilitas RB, SPIP, ZI, WBK dan WBM di lingkungan BPSDM	1 layanan
		Sosialisasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, Pelaksanaan RB dan Maturitas SPIP Terintegrasi BPSDM Hukum dan HAM	Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan ZI Menunju WBK/WBBM, Pelaksanaan RB dan Maturitas SPIP Terintegrasi BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2024 (7 Mei 2024) di Auditorium Lantai 2	1 Dokumen
		Evaluasi Kertas Kerja RB, ZI, SPIP	Terlaksananya kegiatan Desk Evaluasi oleh TPI Inspektorat Jenderal Pembangunan ZI Menuju WBK BPSDM Hukum dan HAM (16 Mei 2024) di Auditorium Lt 2	1 Dokumen
		Verifikasi Data Dukung RKT Reformasi Birokrasi, Zona	Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi Data Dukung RKT Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan SPIP Pada Evaluasi Kertas Kerja RB, ZI dan SPIP (26-28 Juni 2024) di	1 Dokumen

No	Bagian	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian
		Integritas dan SPIP	Grand Melia Hotel	
		Supervisi RB, Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM dan SPIP	Badiklat Sulawesi Utara 21-23 Agustus Badiklat Kepulauan Riau 28-30 Agustus Badiklat Jawa Tengah 4-6 September	3 Dokumen
		Evaluasi tahap wawancara Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK oleh Tim Penilai Mandiri (TPM)	Terlaksananya kegiatan **Evaluasi tahap wawancara** Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK oleh Tim Penilai Mandiri (TPM) Kementerian Hukum dan HAM (8 Oktober 2024)	1 Dokumen
		Verifikasi Lapangan Satuan Kerja	Terlaksananya Verifikasi Lapangan Satuan Kerja Menuju WBK BPSDM Hukum dan HAM (25 Oktober 2024)	1 Dokumen
2	Kepegawaian	Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian (Adm Jabfung Pemberhentian dan Umum Mutasi Kepegawaian)	Terselenggaranya layanan administrasi jabatan dan pemberhentian di lingkungan BPSDM Hukum (melalui pengelolaan Kenaikan Pangkat, KGB, Karis Karsu, Izin dan Tugas Belajar, Pencantuman Gelar, Penghargaan SLKS)	1 Layanan
		Administrasi Jabatan Fungsional di lingkungan BPSDM	Terselenggaranya layanan administrasi jabatan fungsional di lingkungan BPSDM Hukum (kenaikan jenjang, uji kompetensi, perpindahan jabatan, validasi PAK, Jurnal Widyaiswara)	1 Layanan
		Pembinaan Mental, Fisik dan Penguatan Disiplin Pegawai	Terlaksananya pembinaan mental, fisik dan disiplin pegawai : - Senam - Sosialisasi sistem kerja dan GNIK - Pembinaan mental dan penguatan disiplin (ceramah agama)	1 Dokumen
		Pengembangan Mandiri Pegawai	Terselenggaranya kegiatan pengembangan mandiri bagi 18 pegawai BPSDM Hukum tahun 2024	18 Orang
		Administrasi 10 Jabatan Fungsional di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM	Terselenggaranya Administrasi 10 Jabatan Fungsional di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM	1 layanan
3	Keuangan	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Terselenggaranya kegiatan : 1. Administrasi Pelaksanaan Anggaran, 2. Rekonsiliasi Keuangan 3. Penyusunan Laporan Keuangan di BPSDM Hukum dan HAM	1 layanan

No	Bagian	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian
			4. Penguatan Perpajakan 5. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit	
		Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya 1. Gaji dan Tunjangan untuk PNS dan PPNPN BPSDM 2. Uang lembur PNS BPSDM	1 layanan
		Tindak Lanjut Temuan	Tindak Lanjut Audit Atas Laporan Keuangan	
4	Umum	Layanan BMN	Terselenggaranya kegiatan: 1. Penatausahaan dan Pengelolaan BMN 2. Monitoring dan Evaluasi BMN	1 layanan
		Layanan Humas	Terselenggaranya kegiatan: 1. Hubungan Masyarakat dan Komunikasi 2. Penyediaan informasi publik 3. Pelaksanaan kerjasama	1 layanan
		Layanan Protokoler	1. Koordinasi dan Pelaksanaan Keprotokoleran 2. Pelaksanaan Keprotokoleran	1 layanan
		Layanan Umum	Terselenggaranya layanan : 1. Layanan Urusan Kerumahtanggaan 2. Keperluan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 3. Asisten Pengadaan, Pemeriksaan, Penerimaan, dan Pemeliharaan Perangkat dan Jaringan Teknologi Informasi	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	Terselenggaranya layanan dan pengadaan: 1. Gaji dan tunjangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Kendaraan dinas operasional (sewa 13 unit kendaraan operasional) - Belanja pemeliharaan dan perawatan mesin 3. Langganan daya dan jasa 12 bulan 4. Pemeliharaan gedung, pagar dan halaman 5. Pemeliharaan peralatan perkantoran 6. Belanja keperluan perkantoran 7. Sewa 8. Pakaian Seragam Tenaga Alih Daya 9. Jamuan Tamu 10. Konsultasi/koordinasi 11. Pengelolaan keuangan dan BMN 12. Kesehatan Pegawai 13. Kegiatan Donor Darah 14. Seragam Pegawai	1 layanan

No	Bagian	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian
		Layanan kesehatan	1. Akreditasi Poliklinik BPSDM Hukum dan HAM 2. Layanan Kesehatan	1 layanan
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1. Pengelolaan Arsip dan Persuratan 2. Pengelolaan Perpustakaan	2 layanan
		Layanan Sarana Internal	Terselenggaranya layanan dan pengadaan: 1. Perangkat pengolah data dan informasi 38 PC, 30 laptop, 15 snanner, 12 LCD Monitor, 15 printer, 2 Alat pencetak label, 20 pc komputer, 2. Kendaraan Bermotor (1 mobil) 3. Peralatan fasilitas perkantoran 4 unit Pompa air, 2 Sofa, 6 Portable AC, 1 AC Central, 19 AC Split, 1 Genset, 1 Mesin Cuci, 1 Camera, 150 Kasur, 10 Clip On Mic, 2 Microphone Condesor, 2 Penangkal petir, 7 Pengadaan Mesin absensi, 10 work station, 20 mobile drawer, 20 Kursi Kerja, 1 paket CCTV, 5 IPAD	
		Layanan Prasarana Internal	1. Gedung dan Bangunan	1 layanan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM tahun 2024 sebesar Rp. 112.486.909.605,- atau 98,63% dari pagu Rp. 114.052.258.000,-. Berikut rincian penyerapan anggaran per Bagian di Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM:

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Bagian Program dan Pelaporan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Perencanaan dan Penganggaran	339.579.000	331.846.380	97.72
2	Pemantauan dan Evaluasi	3.414.727.000	3.264.817.309	95.61
3	Pengelolaan Kelembagaan	1.412.635.000	1.283.862.056	90.88
	Layanan Reformasi Kinerja	995.265.000	973.651.351	97.83

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Tusi Kepegawaian

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Administrasi Kepegawaian	92,070,000	63,697,757	69.18
2	Pembinaan Kepegawaian	311.410.000	290.470.402	93.28

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Tusi Keuangan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Gaji dan Tunjangan	21.859.601.000	21.751.109.780	99.50
2	Layanan manajemen keuangan	441.780.000	437.159.826	98.95

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Bagian Umum

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Layanan sarana internal	5.930.478.000	5.885.126.651	99,24
2	Layanan Prasarana internal	79.321.988.000	79,304,142,881	99,98
3	Layanan BMN	430.670.000	362.931.733	84,27
4	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	54.172.000	27.118.500	50,06
5	Layanan Kehumasan	598.162.000	558.600.945	93,39
6	Layanan Protokoler	100.441.000	88.746.056	88,36
7	Layanan Umum	624.609.000	547.509.677	87,66
8	Layanan Perkantoran	46.372.303.000	45.844.265.640	99,07

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Tahun anggaran 2024 nilai IKPA BPSDM Hukum dan HAM mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai IKPA tahun 2024 (94,05). Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut dimana pada komponen kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran, hanya kualitas hasil pelaksanaan anggaran

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

No	Kode Eselon I	Nama Eselon I	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	01302	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Nilai	100.00	78.43	88.47	97.54	100.00	98.42	100.00	94.05	100%	3.00	94.05
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.76	17.69	9.75	10.00	9.84	25.00				
			Nilai Aspek	55.22		86.11				100.00				

Realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan *Disburstmen Plan* yang telah ditetapkan menyebabkan nilai komponen kualitas perencanaan anggaran tidak maksimal. Demikian halnya dengan nilai komponen kualitas pelaksanaan anggaran dimana penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP serta dispensasi SPM juga tidak maksimal. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bersama dan bahan evaluasi dalam pelaksanan anggaran BPSDM hukum dan HAM dan Satuan kerjanya ditahun 2024. Berikut capaian nilai IKPA BPSDM Tahun 2020-2024

Grafik 3.2 Nilai IKPA BPSDM Hukum Tahun 2020-2024

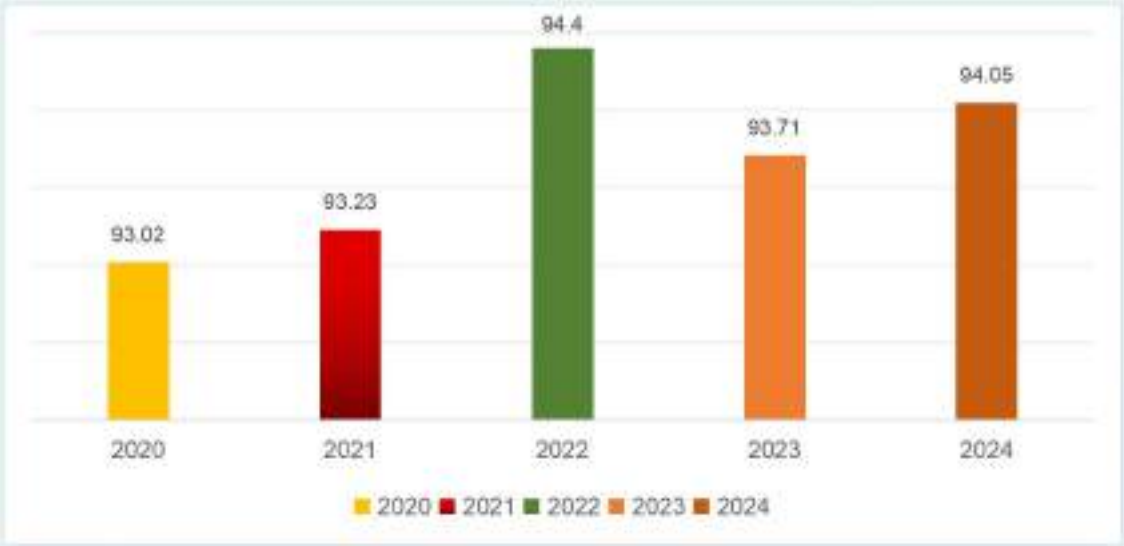

Penilaian SAKIP BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2023

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap institusi pemerintah diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Grafik 3.2 Nilai IKPA BPSDM Hukum Tahun 2020-2024

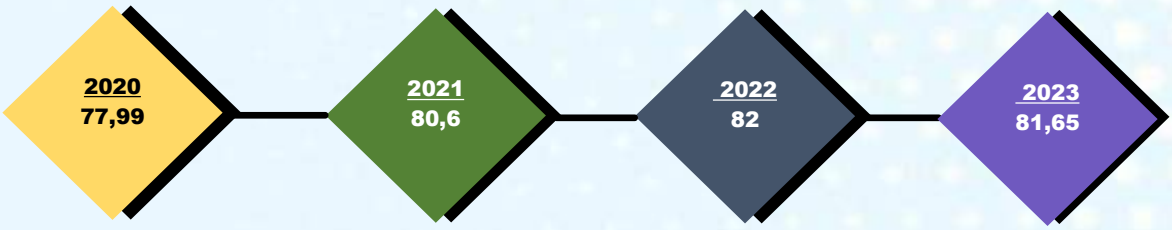

Dari grafik diatas dapat diketahui untuk penilaian SAKIP tahun 2023 BPSDM Hukum dan HAM memperoleh nilai SAKIP sebesar 81,65 dengan predikat A (Sangat Memuaskan). Sehingga bisa disimpulkan, nilai SAKIP yang diperoleh BPSDM Hukum dan HAM sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024.

5. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan mempunyai 3 program pendidikan yang terdiri dari Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, dan Program Studi Teknik Pemasyarakatan. Berikut rincian jumlah taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Tabel 3.19 Komposisi Taruna POLTEKIP

No	ANGKATAN/ TINGKAT	PROGRAM DIPLOMA			TOTAL
		Bimbingan Kemasyarakatan	Manajemen Pemasyarakatan	Teknik Pemasyarakatan	
1	Tingkat I (angkatan 58)	62	109	106	277
2	Tingkat II (angkatan 57)	92	98	161	351

No	ANGKATAN/ TINGKAT	PROGRAM DIPLOMA			TOTAL
		Bimbingan Kemasyarakatan	Manajemen Pemasyarakatan	Teknik Pemasyarakatan	
3	Tingkat III (angkatan 56)	104	114	132	350
4	Tingkat IV (angkatan 55)	105	98	131	334
TOTAL		396 Taruna	408 Taruna	542 Taruna	1.312 Taruna

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, tahun 2024 telah melulusan sebanyak 334 orang. Sesuai dengan Surat Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Nomor SDM.5.SM.09.03-574 tentang Evaluasi Belajar Tahap Akhir Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 55 Tahun Akademik 2024 yang terdiri dari :

1. Program Studi Manajemen Pemasyarakatan sebanyak 98 orang;
2. Program Studi Teknik Pemasyarakatan sebanyak 131 orang;
3. Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan sebanyak 105 orang

Sesuai dengan perintah Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tercantum dalam Surat Perintah Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.1-KP.04.01-5019 lulusan Poltekip Angkatan 55 diperbantukan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Balai Pemasyarakatan) di wilayah.

Selain mengikuti kegiatan akademik di lingkungan kampus Poltekip, Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan banyak mengikuti kegiatan non-akademik berupa perlombaan maupun kejuaraan di berbagai bidang. Berikut ini adalah prestasi yang berhasil dicapai oleh para taruna Poltekip:

Tabel 3.20 Prestasi Taruna POLTEKIP

No	Nama	Penghargaan/Prestasi Kegiatan	Tingkat
1.	Ikhsandy Owendra Asy'ar, Pedro Agung Manurung, Michael William Hulu, Nafi Rahmatul Afif E, Mahmuddin	Runner Up Communication Cup MLBB 2024	II
2.	Mochamad Sandy Pratama Putra, Rayhan Alfendo, Hendra Prasetya, Wisnu Surya Aditya, Putra Jaya, Joseph Bherlian H, Nurranda Fahmi Hawaid, Abdulloh Muhammad Rofiq, M. Raffi Dhanily Zain, Ardy Wiranata Setya, I	Juara 3 Bola Voli Putra IPKEMINDO CUP 2024	I/II/III

No	Nama	Penghargaan/Prestasi Kegiatan	Tingkat
	Kadek Yoga Reka Putra, Erikson Candra Saragih, Petrus Adi Permata Pasaribu, Anang Wibowo, Agum Setyawijaya		
3.	Dien Noor Palupi, Safa Aura Faradisa, Fitriya Sito Siwi, Adhis Ardhining Tyas, Regina Novita Melanie, Tresia Rita Hulir, Mutiara Namira, Ika Ayu Vitria, Shafira Permata Ayu, Falah Fisabilillilah	Juara 3 Bola Voli Putri IPKEMINDO CUP 2024	III
4.	Bayu Abroor Prasetyo, Maulida Az Zahra, Shafira Permata Ayu, Mutiara Namira, Anugrah Jelang Ramadhan, Muhammad Thoriq Arifasha, Nina Dewi Bunga Ramadhani	Juara 1 Badminton IPKEMINDO CUP 2024	I/II/III
5.	Dimas Tramasino, Daffa Helmi Dhiaulhaq, Febrian Zaqy Nugroho, Sulthan Abdullah, Muhammad Hanif, Muhammad Bayu Refansyah, Muhammad Hafif Hidayat, Benyfer Erick, Delarosa Sibangariang, Ahmad Hizbullah, Aditya Prahastomo, Reyhan Dzaky Hutabarat, Zain Difa Waliyuddin, Fajri Ramadhan Btara, Muhammad Rizki Putra, Teuku Randa Pratama, Dwiki Andalas Putra, Reza Agraha Kusuma Mardani	Fourfeo League Cup Tahun 2024	I/II/III
6.	Rafliyandi Dwi Anugrah	Juara 3 Kata perorangan Senkaido Open Internasional	I
7.	Rizky Aditri Rozal	Juara 3 Kumite perorangan putra Senkaido Open Internasional	I
8.	Muhammad Bagus Tri Fakihudin	Juara 1 Kata Mahasiswa Sabuk Hitam Senkaido Open Internasional	II
9.	Simon Piter Nugraha Simbolon	Juara 1 Senior – 84 Senkaido Open Internasional	II
10.	Natanael Gracio	Juara 1 Senior -75 Senkaido Open Internasional	II
11.	Muhammad Erwin Fazza	Juara 1 Senior -75 Senkaido Open Internasional	II
12.	Advent Jeremia	JUARA 1 Senior -67 Senkaido Open Internasional	II

No	Nama	Penghargaan/Prestasi Kegiatan	Tingkat
13.	Vixsa Varel	JUARA 2 senior - 75 Senkaido Open Internasional Senkaido Open Internasional	II
14.	I Gusti Ngurah Bagus Ugra	JUARA 2 senior - 75 Senkaido Open Internasional	II
15.	Djuan Muhammad Al Visal	Juara 2 Kata Mahasiswa Sabuk Biru Senkaido Open Internasional	II
16.	Donita Pandu Pertiwi	Juara 2 Kata Mahasiswa Sabuk Biru Senkaido Open Internasional	II
17.	Muhammad Devantama	Juara 3 Lomba Esai Nasional pada kompetisi Kreativitas HMPD Universitas Sriwijaya 2024	III
18.	Afifa Fauna Maretanastart Syaputri	Juara 2 Poster Publik pada Lomba Poster Publik MSC Event 2024	II
19.	Donita Pandu Pertiwi	Juara 2 Poster Publik pada Lomba Poster Publik MSC Event 2024	II
20.	Ikhsandy Owendra Asy'ari, Pedro Agung Manurung, Muzakir, Rizky Andrian, Nafi Rahmatul Afif, Michael William Hulu, Aditya Renhad Alfredo Siahaan	Juara 2 Tournamen Mobile Legends VET CUP Universitas Gajah Mada	II
21.	Dendy Zaky Rahmad	Juara 2 Fotografi Kemenkes Ruang Kreasi Competition 2024	II
22.	Abyan Lazuardi Al Faruq	Juara 3 Fotografi Kemenkes Ruang Kreasi Competition 2024	III
23.	Ardianto Romatua Bakara, Aldo Marcelino, Helena Gracelda Situmeang, Ekawatiningtyas, Gabriel Omar Habib	Juara 1 Grup Vokal Ruang Kreasi Competition 2024	III
24.	Michael Yosafat Anugrah Putra Butar Butar	Juara 2 Vokal Solo Forse Uima 2024	II
25.	Aliya Salma, Safa Aura Faradisa, Moch. Rival Aditya, Kharisma Hurilin, Bryan Liharson Sihaloho,	Juara 1 Lomba Tari Forse Uima 2024	III/II
26.	Qudratullah Marwi	Juara 3 Poster Economic Festival Universitas Bengkulu 2024	II

No	Nama	Penghargaan/Prestasi Kegiatan	Tingkat
27.	Advent Jeremia	Juara 3 Mahasiswa Kumite -67 Unj Cup Xii National Open Karate Championship 2024, Ina	II
28.	Vixsa Varel	Juara 3 Senior Kumite -75 Unj Cup Xii National Open Karate Championship 2024, Ina	II
29.	Nur Aprilia Savitri, Riduwan Al-Farisi, Abyan Lazuardi Al Faruq, Farhan Anugerah Purnama, M. Faruq Alamsyah, Akbar Setiardi Ansyari, Ahmad Julian Igra Batara	Juara 3 Lomba Video Kreatif PORSIMAPTAR 2024	III
30.	Axel Saragih	Top Score Futsal PORSIMAPTAR 2024	II
31.	Safa Aura Faradisa, Aliya Salma, Kharisma Huril'in, Moch. Rival Aditya, Bryan Liharson Sihaloho	Best Costume Tari Kreasi Cultivex 2024	III
32.	Girindra Muhammad Afrel, Andre Manuella Pasaribu, Jesaya Ananda Berutu, Rizky Surya Baskara, Alfarizeki Edytiawarman, Dimas Boneyudha Pratama, Ilham Restu Utomo, Farhan Abdurrahman, Muhammad Agung Izzul Haq, Haiqal Zulfi Ramadhan, Didan Bintang Taruna, Agam Prajasyah Setiawan	Lomba Psychology Expo Basketball 2024	III

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dalam menjalankan kegiatannya didukung dengan layanan perkantoran yang menunjang kegiatan sehari-hari, berikut rincian anggaran Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip):

Tabel 3.21 Anggaran POLTEKIP

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Prosentase
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.546.631.000	11.370.855.844	98,48 %
2	Layanan Manajemen SDM Internal	34.265.588.000	34.245.543.697	99,94%
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal	122.884.000	118.642.901	96,55%
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	206.028.000	206.022.000	100%
	Jumlah	**46.141.131.000**	**45.941.064.442**	**99,57 %**

Dari sisi anggaran capaian Polteknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) pada tahun 2024 menyerap anggaran sebanyak Rp. **45.941.064.442,-** (**99,57 %**) dari pagu anggaran yang telah ditargetkan sebesar Rp. **46.141.131.000,-**

6. Politeknik Imigrasi

Politeknik Imigrasi mempunyai 3 program pendidikan yang terdiri dari Program Studi Hukum Keimigrasian, Program Studi Administrasi Keimigrasian dan Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian. Berikut rincian jumlah taruna pada masing-masing program studi:

Tabel 3.22 Komposisi Taruna POLTEKIM

NO	TINGKAT (ANGKATAN)	PROGRAM DIPLOMA			TOTAL ANGKATAN
		HUKUM KEIMIGRASIAN	ADMIN KEIMIGRASIAN	MANAJEMEN TEKNOLOGI KEIMIGRASIAN	
1	Tingkat I (Angkatan 25)	108	108	88	304
2	Tingkat II Angkatan 24)	121	117	77	315
3	Tingkat III (Angkatan 23)	117	115	67	299
4	Tingkat IV (Angkatan 22)	115	111	65	291
TOTAL		461 Taruna	451 Taruna	297 Taruna	1.209 Taruna

Metode pembelajaran dan pengajaran pendidikan yang dilakukan oleh Dosen pada lingkungan belajar Politeknik Imigrasi memiliki tujuan agar taruna dapat mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Metode pembelajaran dan pengajaran dilakukan dengan kegiatan: Kuliah, Tanya Jawab, Presentasi Taruna, Diskusi, Penugasan, Demonstrasi, Simulasi, *Role Play* / Bermain Peran, Studi Kasus, *Interactive Teaching and Learning*, Pembelajaran Kooperatif, Pembelajaran Kolaboratif, *Drill* / Latihan, *Focus Group Discussion* (FGD), Seminar, Lokakarya (*Workshop*), dan *E-Learning*, dan lain - lain.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap taruna tingkat IV Tahun 2024 diketahui jumlah awal sebanyak 291 taruna namun selama proses pelatihan dan

pengajaran akademik terjadi pelanggaran berat dan diputuskan dalam Rapat Dewan Dosen (RDD) pada Tanggal 7 Juni 2024 SK Hukdis Tahan Tingkat atas nama Raihan Ahmad Arif.

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Lulusan Poltekim antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Penempatan taruna Politeknik Imigrasi 100% diserahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai user utama dan pembina teknis dari Politeknik Imigrasi, dimana nantinya lulusan ini juga akan disebar ke seluruh UPT/Kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai dengan kompetensi jabatan yang dimiliki.

Taruna Politeknik Imigrasi banyak mengikuti perlombaan maupun kejuaraan di berbagai bidang berikut ini adalah prestasi yang berhasil dicapai oleh para taruna Poltekim:

Tabel 3.23 Prestasi Taruna POLTEKIM

NO	NAMA	PRESTASI	TINGKAT
1.	Atsil Syah Gibran, Muhammad Yoga Dwinanda, Rizky Zuhri Wiyadi, Reza Akbar Pratama, Vidi Selvino Manurung	Bronze Medal Kompetisi Asean Innovative Science Enviromental and Enterpreneur Fair (AISEEF) Tahun 2024	IV
2.	Abellya Manalu, Afif Alfian, Ajeep Akbar Qolby, Akbar Priantana Ramadhan, Alvino Arya Putra Wildan, Andika Ardiansyah, Andra Milen Pratama, Brama Yudha Agatha Sembiring, Damarjati Mahatma Amrullah, Elvina Zora Lathifah, Fadhilatul Ikhsan,	Gold Medal Kompetisi Youth International Science Fair Tahun 2024	III
3.	Muhammad Choirul Yusuf, Kuncoro Wisnu Murti, M. Fadly Khusairy, Anastasya Tri Andriani Hidayat, Dwiki Praditya, Sarina Riyadi, Ilham Akbar Dzaky Al Dzikri	Silver Medal Kompetisi Invention and Innovation Fair (IIF) Ke-2 Nasional Tahun 2024	III
4.	Hanny Mentari Bahri, Maulana Budi Putra, Leonardo Oktaviano Rendu,	Juara 3 Lomba Menulis Artikel U-MIKAT Nostalgic Transformer	I
5.	Wildan Hanif Kumoro Jati	Juara 2 Lomba Poster U-MIKAT Nostalgic Transformer	I
6.	Lalu Muhammad Fery Akbar, Fazril Habib, Akram Hutasuhut, Yosua	Juara 1 Lomba Sepak Bola Premier Funfootball Dalam	II/IV

NO	NAMA	PRESTASI	TINGKAT
	Hernando, Asyraq Fadhillah, Najmi Ramadhian R, Revan Setiaji, Frasha Hideo Maulana, M. Ravievsyah Fahlepi, Hanif Nabhana M, Ikhsanul Fikri Saputra, Shandy Suryamahendra, Ilham Ismail, Ghivarrel Raihan Khan, Reski Adi Bazri, Rayyan Rizqiki K, Bintang Bongiovi Ramdho Sabri, Jeremia Ardana, Cristian Tarigan, Afif Azmi, Gillbert Adriel R S, Muhammad Fajrin, M. Fadel Alfalazi, Alqodri Nugraha R	Rangka Dirgahayu RI Ke-79 Tahun 2024	
7.	Andrayane Vera Oktafia	Juara 1 Lomba Story Telling Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan (PIPTK) Tahun 2024	II
8.	Anna Evita Marreta Panjaitan, Muhammad Okahadiwan Bayunillah, Hazel Athallah Asekanatmaj, I Gusti Ayu Pramestia Sukma	Juara 2 Lomba English Speech Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan (PIPTK) Tahun 2024	I/II
9.	Anak Agung Istri Agung Cyntia Pramesti, Dewi, Akram Imam Syah, Dimas Septiadi	Juara Harapan 1 Lomba Debat Bahasa Indonesia Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan (PIPTK) Tahun 2024	I
10.	Besar Tri Wibowo, M. Rifky Satriawan, Shelvy Shandi ardana, Adikara Akbar Amrullah, Eksanti Desta Putri, Fahira Prameswari, Firda Royyani Yudhantari, Diskara Tempati	Juara 2 Bulu Tangkis IPKEMINDO CUP Tahun 2024	I/II/III
11.	M. Arief Setiawan, Kuncoro Wisnu Murti, Raynard Arya Prasetya, Khalif Arva Arizky, Gigih Ariq Nugraha, Rio Kasriansyah, Taruna Vradia Bagaskara, Kukuh Lingga Baskoro, Refly Dwi Irawan, Andi Muhammad Fawwaz Palla, Ridha Eka Hermawan Siregar, Vito Ananda Ismail,	Juara 1 Turnamen Basket Fakultas Teknik UPN Veteran Jakarta Tahun 2024	I/II/III
12.	Andrayane Vera Oktafia	Juara 1 Lomba Story Telling Porsimaptar Tahun 2024	II
13.	Anna Evita Marreta Panjaitan	Juara 1 Lomba English Speech Porsimaptar Tahun 2024	II
14.	Muhadzib Rezki Hilmy	Juara 1 Lomba Olimpiade Sains Pancasila Nasional Tahun 2024	III
15.	Timothy Indramora Manurung	Juara 1 Lomba Karate Piala Panglima TNI Tahun 2024	III
16.	Netania Kepri Sinaga, Alfian Sabri Ramadani, M. Faitak Robith Al Islam, M. Reza Fajar Maulana, Ni Kadek Siva Ayu,	Juara 1 Lomba Video Kreatif Porsimaptar Tahun 2024	II

NO	NAMA	PRESTASI	TINGKAT
	Anastasya Febiona Tambunan, Adies Robby Mahaputra, Edwin Alfian		
17.	Ajeep Akbar Qolby, Muhammad Choirul Yusuf, Ilham Akbar Dzaky Al Dzikri,	Juara 3 Karya Tulis Ilmiah Porsimaptar Tahun 2024	II/III
18.	Muhammad Raffi Ardiansyah, M. Arief Setiawan, Rio Kasriansyah, Taruna Vradia Bagaskara, Refly Dwi Irawan, Imran Abrilianno, Raynard Arya Prasetya, Gigih Ariq Nugraha, Kukuh Lingga Baskoro, Ridha Eka Hermawan Siregar, Vito Ananda Ismail, Andi Muhammad Fawwaz Pallawagau	Juara 3 Basketball Porsimaptar Tahun 2024	I/II/III
19.	Atsal Rais Getar Awan	Juara 2 Kyorugi Senior Putra U- 68 Kg Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 8 Tahun 2024	I
20.	Muhammad Iqbal Zulfikar	Juara 2 Kyorugi Senior Putra U- 58 Kg Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 8 Tahun 2024	I
21.	Irwan Rucwando Laode	Juara 2 Kyorugi Senior Putra U- 65 kg Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 8 Tahun 2024	I
22.	Zacki Ahta Sajjana	Juara 1 Kyorugi Senior Putra U- 68 Kg Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 8 Tahun 2024	I
23.	Syuja Abdi Guna	Juara 1 Kyorugi Senior Putra U- 64 Kg Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 8 Tahun 2024	I
24.	Muhammad Satrio	Juara 1 Kyorugi Senior Putra U- 64 Kg Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 8 Tahun 2024	I
25.	Muhammad Tsaqib Ats- Tsany	Juara 1 kyorugi senior putra U-74kg Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 8 Tahun 2024	I
26.	Nayaka Arsenio Pandya Masduqi	Juara 2 kyorugi senior putra U- 68 Kg Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 8 Tahun 2024	I
27.	I Gde Prama Dutha Eswara	Juara 1 kyorugi senior putra U-68 Kg Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 8 Tahun 2024	I
28.	Dhito Rahmad Kurniawan	Juara 2 kyorugi senior putra u-68 Kg Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 8 Tahun 2024	I
29.	Dzaky Ahnaf Rafi'i	Juara 2 kyorugi senior putra u-68 Kg Liga Taekwondo DKI	I

NO	NAMA	PRESTASI	TINGKAT
		Jakarta Series 8 Tahun 2024	
30.	Prigani Jayadilaga	Juara 1 kyorugi senior putra U-74kg Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 8 Tahun 2024	I
31.	Evelyne Galih Kanza Aulia	Juara 1 kyorugi senior putri U-63 kg Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 8 Tahun 2024	I
32.	Rakhaditya Faris	Juara 1 Poomsae Individual Senior Putra Taegeuk 2 Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 8 Tahun 2024	I
33.	Hanif Yudha Pratama	Juara 2 Poomsae Individual Senior Putra Taegeuk 3 Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 8 Tahun 2024	I
34.	Rio Trinanda	Juara 2 Poomsae Individual Senior Putra Taegeuk 4 Liga Taekwondo DKI Jakarta Series 8 Tahun 2024	I
35.	Muhadzib Rezki Hilmy	Juara 1 Lomba Olimpiade Sains Pemuda Tahun 2024	III
36.	Ilham Akbar Dzaky Al Dzikri, Anak Agung Istri Agung Cyntia Pramesti Dewi, Hans Yudha Putera Negara, Willy Juliantoro, Elvira Rossi,	Bronze Medal Kegiatan International Invention and Innovative Competition (INVIIC) Tahun 2024	II
37.	Ilham Akbar Dzaky Al Dzikri, Ervan Fawwaaz Wijanarko, Lilinur Indrasari, Nurul Aulia Salsabila, Rigga Patria Pamungkas,	Silver Medal Kegiatan International Invention and Innovative Competition (INVIIC) Tahun 2024	II
38.	Ajeep Akbar Qolby, Abellya Manalu, Angga Susetyo, Amalia Kusuma Wardhani, Fadhilatul Ikhsan, Andika Ardiansyah, Damarjati Mahatma Amrullah,	Juara 2 Lomba 4th World Youth Invention and Innovation Award 2024	III
39.	Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin	Juara 1 Kategori F Kejuaraan Pencak Silat Kapolda Banten Open Cup Tahun 2024	III
40.	Immanuel Richard Pasaribu	Juara 2 Kategori C Kejuaraan Pencak Silat Kapolda Banten Open Cup Tahun 2024	II
41.	Fedora Felix Krisanto	Juara 2 Kategori D Kejuaraan Pencak Silat Kapolda Banten Open Cup Tahun 2024	III
42.	Ahmad Dzukhfriza Moga Syahid	Juara 1 Kategori E Kejuaraan Pencak Silat Kapolda Banten	III

NO	NAMA	PRESTASI	TINGKAT
		Open Cup Tahun 2024	
43.	Hosefianta Karolus Sihotang	Juara 2 Kategori Male 10KM Reformasi Run IKA Trisakti tahun 2024	IV
44.	Alfian Sabri Ramadani	Juara 2 Lomba Fotografi FOKRI Games X Tahun 2024	II

Politeknik Imigrasi dalam menjalankan kegiatannya di dukung dengan layanan perkantoran yang menunjang kegiatan sehari-hari, berikut rincian realisasi anggaran Politeknik Imigrasi:

Tabel 3.24 Realisasi Anggaran POLTEKIM

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.053.570.000	9.018.355.949	99,6%
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	257.320.000	250.821.990	97,4%
3	Layanan Manajemen SDM Internal	32.047.311.000	32.046.654.745	99,9%
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	897.498.000	897.498.000	100%
	Jumlah	**42.255.699.000**	**42.159.048.834**	**99,7%**

7. Balai Diklat Hukum dan HAM

Capaian kinerja pada tiga Balai Diklat Hukum dan HAM pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Capaian Kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM

Indikator	Kinerja		%	Anggaran (Rp)		%
	Target (RKAKL)	Realisasi		Target	Realisasi	
Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	83	83	111,7%	23.167.595.000	22.833.268.476	98,6%
Jumlah Lulusan Diklat Wilayah	18.701	24.445	117,5%			

No.	Balai Diklat Hukum dan HAM	Nama Pengembangan Kompetensi	Metode	Output Peserta
1.	Kepulauan Riau	Pelatihan Teknis Keimigrasian Pelayanan Dokumen Perjalanan RI	PJJ	80
		Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara	PJJ	120
		Pelatihan Teknis Pemasyarakatan Pengadministrasi Aplikasi SDP	PJJ	80
		Pelatihan Teknis Keimigrasian Document Fraud	KLASIKAL	80
		Mooc Manajemen Resiko Gelombang I	MOOC	431
		Pelatihan Teknis Pemasyarakatan Latihan Kerja Dan Kegiatan Kerja Produksi	Klasikal	40
		Pelatihan Teknis Kerja Sama Keimigrasian Tingkat Dasar	PJJ	80
		Pelatihan Teknis Pemasyarakatan Petugas Pengamanan Tingkat Dasar	Klasikal	80
		Pelatihan Teknis Pemasyarakatan Pemeriksa Pelanggaran Tata Tertib	PJJ	80
		Pelatihan Teknis Pemasyarakatan Pelayanan Anak Di LPKA	PJJ	80
		Pelatihan Dasar Cpns	Blended	274
		Mooc Manajemen Resiko Gelombang Ii	MOOC	284
		Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik (MRSOP)	PJJ	20
		Pelatihan Certified Government Risk Specialist (CGRS)	Klasikal	20
		Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa Level I Angkatan I Dan II	Blended	80
		Webinar Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Peningkatan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum	Webinar	1.468

		Dan Hak Asasi Manusia		
		Webinar Nasional Dengan Tema "Analisis Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia"	Webinar	2.990
		Webinar "Membangun Instrumen Asesmen Kriminogenik Yang Efektif Di Indonesia"	Webinar	826
		Webinar "Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Era Artificial Intelligence"	Webinar	758
		Webinar Strategi Intelijen Menghadapi Ancaman TPPO Di Era Digital	Webinar	666
JUMLAH				**8.531**
2	Jawa Tengah	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tk. Dasar PJJ Angkatan I-II	PJJ	78
		Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar	Klasikal	40
		MOOC Keprotokolan	MOOC	825
		Pelatihan Administrasi Kepegawaian Angkatan I-II	PJJ	75
		Webinar Organisasi dan Aparatur Adaptif	Hybrid	1.172
		MOOC Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar	MOOC	807
		Pelatihan Teknis Pembentukan Kedisiplinan Pemasyarakatan (Kesamaptaan)	Klasikal	40
		Pelatihan Teknis Legal Drafting / Perancangan Peraturan Per UU	Klasikal	40
		Pelatihan Teknis Pemasyarakatan Assesment dan Klasifikasi WBP	Klasikal	40
		Webinar "Birokrasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045: Peluang dan Tantangan"	Hybrid	1.115

		Pelatihan Kehumasan dan Corporate Branding Angkatan I-II	Klasikal	80
		Pelatihan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Angkatan I-II	PJJ	80
		Pelatihan SPIP dan MR	Klasikal	40
		Pelatihan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Klasikal	40
		Pelatihan Teknis Keimigrasian Sistem Pengamanan Data dan Sistem Informasi Keimigrasian	Klasikal	40
		Pelatihan Bahasa Isyarat	Klasikal	40
		Pelatihan Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran	Klasikal	40
		Pelatihan Penyusunan LKjIP Angkatan I-II	PJJ	79
		Pelatihan Kehumasan Desain Grafis dan Fotografi	Klasikal	40
		MOOC Pelayanan Publik Tingkat Dasar	MOOC	603
		Webinar "Peningkatan Keterampilan Komunikasi untuk Kinerja Profesional"	Hybrid	2.971
		Pelatihan Dasar CPNS	Blended Learning	395
		Webinar "Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Resolusi Tahun 2025	PJJ	3.289
JUMLAH				**11.969**
3	Sulawesi Utara	Pelatihan Pengelolaan BMN	PJJ	30
		Pelatihan Pengelolaan BMN	PJJ	30
		Pelatihan Teknis Latihan Kerja dan Kegiatan Kerja Produksi	klasikal	40
		Pelatihan Teknis Latihan Kerja dan Kegiatan Kerja Produksi	klasikal	40
		Pelatihan Teknik dan Strategi Membangun Publikasi Pelayanan	PJJ	40
		Pelatihan Teknik dan Strategi Membangun Publikasi Pelayanan	PJJ	39
		Pelatihan Kehumasan	klasikal	30
		Pelatihan Kehumasan	klasikal	30
		Pelatihan Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) Keimigrasian	PJJ	40

		Pelatihan Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) Keimigrasian	PJJ	38
		Pelatihan Teknis Kerjasama Keimigrasian Tingkat Dasar	PJJ	38
		Pelatihan Teknis Kerjasama Keimigrasian Tingkat Dasar	PJJ	38
		Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar	Klasikal	40
		Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar	Klasikal	40
		Pelatihan Basic Trauma Cardiac Live Support (BTCLS)	Klasikal	25
		Pelatihan Basic Trauma Cardiac Live Support (BTCLS)	Klasikal	25
		Pelatihan Pembentukan Kedisiplinan Pemasyarakatan (Kesamaptaan)	Klasikal	40
		Pelatihan Pembentukan Kedisiplinan Pemasyarakatan (Kesamaptaan)	Klasikal	40
		Pelatihan Teknis Pelayanan Pengadministrasian Aplikasi SDP	PJJ	39
		Pelatihan Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar	PJJ	40
		Pelatihan Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar	PJJ	40
		Pelatihan Pembentukan Kedisiplinan Pemasyarakatan (Kesamaptaan)	klasikal	40
		MOOC Konsep Dasar Ham	MOOC	254
		Pelatihan Teknis Pelayanan anak di LPKA	Blended Learning	40
		Pelatihan Teknis Pelayanan anak di LPKA	Blended Learning	40
		Webinar Transformasi Tata Kelola Jabatan Fungsional	Virtual	1412
		Pelatihan Intelijen Keimigrasian	PJJ	38
		Pelatihan Intelijen Keimigrasian	PJJ	38
		MOOC APTD (Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar)	MOOC	476
		MOOC Pelayanan Publik Tingkat Dasar	MOOC	276
		MOOC Peran Strategis BSK	MOOC	279
		Pelatihan Protokoler Akt VI	PJJ	30
		Pelatihan Protokoler Akt VII	PJJ	30
		Pelatihan Pelayanan Anak di LPKA	PJJ	39
		Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	Blended	37

		Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	Blended	104
		BIMTEK BAHASA ISYARAT	klasikal	50
JUMLAH				**3.945**

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Webinar Series “Cerdas Bersama BPSDM Hukum dan HAM”

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), BPSDM Hukum dan HAM meluncurkan Webinar Series dengan tema "Cerdas Bersama BPSDM". Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya percepatan dan implementasi dari Undang-undang 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara mewajibkan untuk melakukan pengembangan Kompetensi.

Webinar Series bertajuk “Cerdas Bersama BPSDM ” diresmikan dan dihadiri langsung oleh bapak menteri hukum dan ham sebagai narasumber utama dengan materi “SDM Berkualitas Menyongsong Indonesia Emas 2045. Webinar Series “Cerdas Bersama BPSDM” diselenggarakan sebanyak 6 series dengan tema yang berbeda serta menghadirkan narasumber yang sesuai dengan kompetensinya. Sampai dengan akhir pelaksanaan Webinar Series sebanyak **293.670** peserta mengikuti kegiatan ini.

Tabel 3.25 Penyelenggaraan Webinar Series

No	Webinar Serie	Pelaksanaan	Peserta	Penyelenggara
1	Webinar Seri I “ Siapkan SDM Unggul 2045”	5 Agustus 2024	57.476	Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan
2	Webinar Seri II “Karir dan Kinerja Jabatan Fungsional Sebagai Penggerak Pembangunan ASN Berakhlak ”	29 Agustus 2024	47.361	Pusbanglat Fungsional dan HAM
3	Webinar Seri III “Kenali Potensimu Maksimalkan Performamu”	12 September 2024	48.863	Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan
4	Webinar Seri IV “Jabatan Fungsional Sebagai Investasi Masa Depan Organisasi”	26 September 2024	47.206	Pusbanglat Fungsional dan HAM
5	Webinar Seri V “Powerful Coaching, Mentoring dan Counseling Untuk Perubahan Organisasi dan Pengembangan Kompetensi ASN”	10 Oktober 2024	47.472	Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan

No	Webinar Serie	Pelaksanaan	Peserta	Penyelenggara
6	Webinar Seri VI "Personal Branding Aparatur Sipil Negara"	24 Oktober 2024	45.292	Pusbanglat Fungsional dan HAM
Total			**293.670**	

2. Peresmian Politeknik Pengayoman Indonesia

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, meresmikan restrukturisasi dua Politeknik, yaitu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi menjadi satu atap, yaitu Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN). Kampus POLTEKPIN yang berlokasi di Tangerang ini tengah dalam proses pembangunan, dengan gedung Rektorat B yang masih dalam tahap konstruksi.

Restrukturisasi kedua Politeknik ini dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen dan operasional pendidikan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Upaya restrukturisasi

ini dilakukan dengan memperhatikan dan mengedepankan optimalisasi tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Sehingga hasilnya akan mampu menciptakan birokrasi yang agile dan adaptif, terutama di bidang pendidikan demi menciptakan SDM yang berkompeten.

POLTEKPIN, direncanakan akan membuka jurusan dan program studi baru, serta membuka pendidikan profesi, magister terapan, dan doktor terapan, yang sesuai dengan relevansi zaman dan kebutuhan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penambahan program baru tersebut diharapkan mampu menjadi sumber rekrutmen serta peningkatan kompetensi bagi tenaga profesional di Kementerian Hukum dan HAM.

Melalui upaya restrukturisasi, POLTEKPIN diharapkan mampu menjadi lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama profesionalisme di bidang hukum dan HAM, serta mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

3. Paradigma Baru *Corporate University*

Paradigma baru Corporate University menjadi strategi untuk mewujudkan link and match antara pembelajaran, pengelolaan kompetensi, dan pencapaian sasaran kinerja organisasi. Strategi dilakukan melalui lima faktor yaitu sistem pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi, tenaga pendidikan yang berkualitas dalam pembelajaran klasikal dan virtual, sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir, teknologi yang berkualitas, serta kerjasama dengan institusi pendidikan. Paradigma baru Corpu menempatkan pegawai sebagai aktor utama dalam proses pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Corporate University bukan sekadar lembaga pendidikan formal,

melainkan sebuah sistem terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Corpu dirancang berbasis analisis kebutuhan pelatihan guna mendukung target organisasi. Dengan kata lain, ini adalah sistem pembelajaran yang fokus pada kebutuhan spesifik pegawai dalam mencapai tujuan Kemenkumham. BPSDM menekankan bahwa pengembangan kompetensi bukanlah tanggung jawab tunggal BPSDM, melainkan merupakan kewajiban dan hak seluruh pegawai.

Untuk mensosialisasikan kebijakan baru ini, BPSDM Hukum dan HAM telah melakukan sosialisasi ke beberapa Kantor Wilayah antara lain:

1. Kantor Wilayah Kemenkumham NTB;
2. Kantor Wilayah Kemenkumham Bali;
3. Kantor Wilayah Kemenkumham Banten;
4. Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat;
5. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur;
6. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah;
7. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat.

Kegiatan ini dilakukan secara daring dan luring yang diikuti oleh seluruh pegawai dan jajaran di lingkungan Kantor Wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya peserta yang mengikuti sosialisasi mendapatkan sertifikat kegiatan dengan log in terlebih dahulu ke dalam aplikasi MOOC Kemenkumham, dan sebanyak **10.791** orang telah mengikuti serta **9.213** orang telah mendownload sertifikat kegiatan.

4. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di BPSDM Hukum dan HAM merupakan wujud komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap pegawai dan pimpinan memiliki integritas tinggi dalam

menjalankan tugasnya. Langkah-langkah ini diwujudkan dengan memperkuat pengawasan internal, membangun transparansi, serta meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas pegawai.

Dalam prosesnya, BPSDM Hukum dan HAM mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance, seperti akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas. Program pembangunan Zona Integritas juga menekankan pentingnya penguatan budaya anti-korupsi melalui pelatihan dan pengembangan karakter pegawai, agar senantiasa menjunjung tinggi etika dan moral dalam memberikan pelayanan.

Selain itu, BPSDM Hukum dan HAM juga berupaya menciptakan sistem pengelolaan SDM yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pegawai. Hal ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan, yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.Dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK ini, BPSDM Hukum dan HAM diharapkan dapat menjadi instansi yang bersih, bebas dari praktik korupsi, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas kepada masyarakat.

Setelah melalui serangkaian penilaian oleh Tim Evaluasi Zona Integritas, akhirnya BPSDM Hukum dan HAM memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai bentuk penghargaan atas usaha seluruh jajaran BPSDM Hukum dan HAM dalam menciptakan lingkungan yang menjunjung nilai integritas serta bebas dari seluruh tindakan korupsi.

5. Rapat Koordinasi Akselerasi *Corporate University*

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM mengadakan Rapat Koordinasi Akselerasi *Corporate University* Tahun 2024 dengan tema "Pengembangan Kompetensi SDM dalam Rangka Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dibuka langsung oleh Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., dan berlangsung selama tiga hari, dari 6 hingga 8 November 2024 bertempat di Hotel Mercure Batavia Jakarta yang dihadiri oleh Perwakilan Eselon I, Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah serta Pihak Eksternal yang mendukung tugas dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Rakor ini menghasilkan dokumen pendukung pelaksanaan Corporate University antara lain:

1. Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Pengembangan Kompetensi Terintegrasi.
2. Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Pedoman Corporate University;
3. Rancangan Keputusan Menteri Hukum tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi.

6. Pengembangan Aplikasi E-Kompetensiku

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi berbasis Corporate University, BPSDM Hukum dan HAM membangun sistem aplikasi **E-Kompetensiku.** E-Kompetensiku adalah sebuah aplikasi yang menyediakan layanan BPSDM atau KMS (Knowledge Management System) yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan dan data penilaian kompetensi dan pelatihan. Didalam aplikasi E-Kompetensiku saat ini terdapat beberapa fitur antara lain :

i. *LMS (Learning Management System)* sebagai portal web layanan pengembangan kompetensi seperti e-latidiri (pelatihan secara mandiri dan massive), dan e-kita cerdas (pelatihan jarak jauh/e-learning);
ii. *Simplisiti* (sistem informasi yang mengelola data penilaian kompetensi dan pelatihan);
iii. Penilaian Kompetensi :
   - e-ukomnis (Alat untuk melakukan uji kompetensi teknis pegawai),
   - e-potensiku (aplikasi untuk mengukur potensi pegawai seperti kapabilitas berpikir, sikap kerja dan sebagainya),
   - e-pridiksi MSK (alat untuk mengukur pegawai dalam situasi peran atau kondisi kerja yang relevan).
iv. Fitur daftar kegiatan penilaian kompetensi dan pelatihan pegawai, melihat daftar peserta, melihat peringkat terbaik dalam suatu pelatihan, serta menampilkan sort video/testimoni kegiatan;
v. *Coaching dan Mentoring*, bisnis proses layanan ini memungkinkan rangkaian kegiatan coaching (Permohonan, Penetapan Coach dan Coachee, Pelaporan, Evaluasi dan Cetak sertifikat dapat terekam dan tercatat sebagai keluaran pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai;
vi. *Insporation Digital Library* (IDL) yaitu koleksi digital yang berisi beragam kisah inspiratif dari Insan Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM. IDL dirancang untuk menjadi sumber daya yang kaya akan motivasi dan wawasan, perpustakaan ini menyediakan akses mudah ke pengalaman hidup, perjalanan karier, serta tantangan dan keberhasilan yang dihadapi oleh individu-individu yang telah meninggalkan jejak signifikan dalam masyarakat;
vii. Layanan Usulan Peserta Pelatihan 3 JF Terbuka (Khusus Pegawai dari Luar Kemenkumham);
viii. ASN Berpijar LAN RI, kerjasama Future Skills by Pijar Foundation dengan LAN RI untuk meningkatkan kompetensi ASN dengan menawarkan topik pelatihan praktis dan relevan dalam menghadapi tantangan era digital dan pengembangan karir pemerintaha

7. Pelaksanaan Webinar pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM

Tabel 3.26 Pelaksanaan Pelatihan Webinar Baiklat Hukum dan HAM

NO	Nama Badiklat	Uraian Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Output
1.	**Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau**	Webinar Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Peningkatan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	03 April 2024	1.468
		Webinar Nasional Dengan Tema "Analisis Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia"	03 September 2424	2.990
		Webinar "Membangun Instrumen Asesmen Kriminogenik Yang Efektif Di Indonesia"	16 Oktober 2024	826
		Webinar "Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Era Artificial Intelligence"	29 Oktober 2024	758
		Webinar Strategi Intelijen Menghadapi Ancaman TPPO Di Era Digital	06 November 2024	666
2.	**Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah**	Webinar Organisasi dan Aparatur Adaptif	19 Maret 2024	1.172
		Webinar "Birokrasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045: Peluang dan Tantangan"	28 Mei 2024	1.115
		Webinar "Peningkatan Keterampilan Komunikasi untuk Kinerja Profesional"	28 Desember 2024	2.971
		Webinar "Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Resolusi Tahun 2025:	Desember 2024	3.289
3.	**Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara**	Webinar Transformasi Tata Kelola Jabatan Fungsional	24 September 2024	1.412
Jumlah				**1.412**
JUMLAH TOTAL				**16.667**

8. Capaian Prioritas Nasional

BPSDM Hukum dan HAM sebagai Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan kompetensi aparatur di bidang Hukum dan HAM turut serta dalam pelaksanaan Prioritas Nasional Penegakan Hukum Nasional pada proyek PN Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dengan melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi di bidang Pembimbing Kemasyarakatan.

Sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak **319 orang** telah mengikuti dari target output sebesar **320** orang. Berikut rincian progres capaian output Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan yang sudah selesai sampai dengan akhir tahun 2024:

Tabel 3.27 Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan

No	Kegiatan	Tanggal	Output
1.	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Akt. IV	19 Februari-1 Mei 2024	39
2.	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Akt. V	22 April-26 Juni 2024	40
3.	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Akt. VI	10 Juni-31 Juli 2024	40
4.	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Akt. VII	24 Juli-11 September 2024	40
5.	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Akt. VIII	27 Agustus-16 Oktober 2024	39
6.	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Akt. IX	9 Oktober - 29 November 2024	41
7.	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Akt. LV	27 Agustus – 16 Oktober 2024	40
8.	Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Akt. LVI	20 Juni - 3 September 2024	40

Selain melaksanakan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai kegiatan Prioritas Nasional, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan salah satu proyek pada Prioritas Nasional yaitu Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya dengan menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi di Bidang SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya.

Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai kurikulum yang telah disusun dilaksanakan selama 15 hari dengan 121 Jam Pelajaran. Tujuan dari pelatihan ini adalah mendapatkan persamaan persepsi dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak **270 orang** telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi ini. Berikut rincian progres capaian output Pengembangan Kompetensi di Bidang SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya yang sudah selesai sampai dengan akhir tahun 2024 :

Tabel 3.28 Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Output
1	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan I	13-27 Maret 2024	30 orang
2	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan II	26 Juni-10 Juli 2024	30 orang
3	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan III	10 – 24 Juli 2024	30 orang
4	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan IV	31 Juli – 14 Agustus 2024	30 orang
5	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan V	21 Agustus – 4 September 2024	30 orang
6	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan V	19 September – 3 Oktober 2024	30 orang
7	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan VI	9-23 Oktober 2024	30 orang
8	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan VII	30 Oktober-13 November 2024	30 orang
9	Pelatihan Terpadu SPPA Angkatan VIII	13-27 November 2024	30 orang

C. Implementasi Reformasi Birokrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum pada tahun 2024 telah melaksanakan program reformasi birokrasi yang mencakup 9 (sembilan) program terkait 8 (delapan) area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundangundangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Tahun 2024. Nilai Reformasi Birokrasi BPSDM Hukum d merupakan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum sehingga nilai Reformasi Birokrasi BPSDM Hukum tahun 2024 menunggu proses penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian yang dilaksanakan di bulan Maret Tahun 2023. Berikut capaian nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2023:

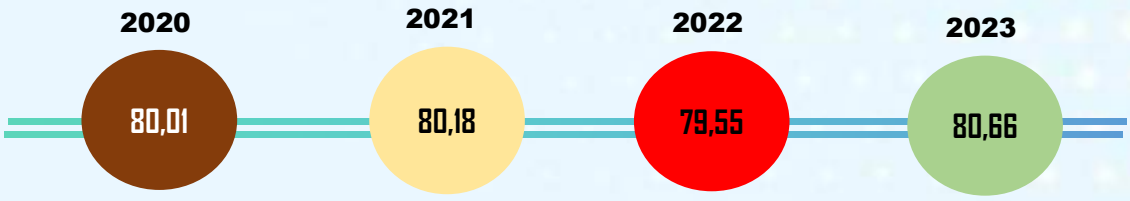

Berikut Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.

Tabel 3.29 Realisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan I

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	• Dokumen PK • Dokumen Rencana Aksi PK • Dokumentasi Penandatanganan PK	100 %
		Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja secara Berkala	• Dokumen Monev Capaian Kinerja • Dokumen Rapat Monev Anggaran • Laporan Monev Anggaran • Laporan Monev Capaian Kinerja • Laporan TL Monev Capaian	100 %

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
			Kinerja	
		Mekanisme Penyusunan LKJiP di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	• SOP Pengumpulan Data Kinerja • SK Pembentukan Tim Penyusunan LKJiP	100 %
		Laporan Kinerja Telah Memberikan Informasi Tentang Kinerja	LKJiP BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2023	100 %
		Publikasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja pada Website Kementerian Hukum dan HAM	Dokumentasi Publikasi DIPA LKJiP, Rencana Aksi PK	100 %
	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran secara Periodik (e- Monev, SMART, dan E-Performance)	Laporan Monev Capaian Kinerja dan Anggaran	100 %
Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Service*)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diterapkan	• Laporan Hasil Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik; • Surat Pernyataan SK Tim PPID • Surat Pernyataan Rapat PPID	100 %
		Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	• Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik; • Laporan TL Hasil Monev Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	100 %
		Publikasi Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada Website dan Media Sosial	Laporan Publikasi Survei SPAK-SPKP	100 %
		Menindaklanjuti Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan	Laporan Hasil TL Survei SPAK- SPKP	100 %

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
		(SPKP) dari Aplikasi 3AS		
		Telah Dilakukan Berbagai Upaya Peningkatan Kemampuan dan/atau Kompetensi tentang Penerapan Budaya Pelayanan Prima	• Dokumen Pelatihan Budaya Pelayanan Prima (Impactful Communicatio n); • Laporan Monev Pelatihan Budaya Pelayanaan Prima (Impactful Communication)	100 %
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Terdapat Mekanisme atau Media untuk mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM	• Dokumen Kegiatan Sosialisasi ZI • Laporan Sosialisasi Kegiatan ZI • Laporan Pencanangan ZI • Dokumen Perjanjian Kinerja • Dokumen Penandatanganan Pakta Integritas • Dokumen Sosialisasi ZI	100 %
		Seluruh Kegiatan Pembangunan Sudah Dilaksanakan Sesuai Dengan Rencana	• Dokumen Kegiatan Rapat Pelaksanaan Rencana Aksi dan Target Prioritas; • Laporan Kegiatan ZI.	100 %
	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun Lingkungan Pengendalian	• Laporan Penerapan Inovasi Lingkungan Pengendalian • Laporan Sosialisasi SPIP • Surat Pernyataan Dokumen MR • Surat Pernyataan SK Tim SPIP • Dokumen Sosialisasi SPIP	100 %
		Telah Dilakukan Penilaian Risiko atas Pelaksanaan	• Surat Pernyataan Dokumen MR • Dokumen	100 %

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
		Kebijakan	Penanganan Risiko Pelayanan Publik	
	Pengeuatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah Diimplementasikan	• Foto Petugas dan Ruang Loket Pengaduan • Capture Aplikasi (LAPOR, • Facebook, Twitter, Instagram, WA, Line)	100 %
		Menindaklanjuti Laporan Penyelesaian Pengaduan dari Aplikasi LAPOR	Laporan Pengaduan Triwulan I	100 %
	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan SK Tim Benturan Kepentingan	100 %
		• Telah Dilakukan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	100 %
		• Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Telah Ditindaklanjuti	Laporan TL Monev Penanganan Benturan Kepentingan	100 %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Pemeliharaan dan Alih Media Arsip Elektronik	Surat Pernyataan Pelaksanaan Pemeliharaan dan Alih Media Arsip Elektronik	100 %
		Penggunaan Aplikasi Srikandi Untuk Persuratan Keluar	Laporan Pelaksanaan Pembuatan Surat Keluar Aplikasi Srikandi	100 %
		Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan	Laporan Hasil Pengisian LKE Kearsipan	100 %
		Pembentukan Tim Pembinaan Kearsipan	SK Tim Kearsipan Tahun 2024	100 %
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pengelolaan Keuangaan dan Aset	Pengawasan dan Pengendalian BMN	Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Tahun 2023	100 %

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
		Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Biro Keuangan Bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah	Laporan TL Hasil Evaluasi Biro Keuangan Tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2023	100 %
		Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan	100 %
Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan Fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Sistem Merit	Terdapat Penetapan Kinerja Individu yang Terkait dengan Perjanjian Kinerja Organisasi	• Dokumen SKP • Dokumen PK • Dokumen Penetapan Kinerja dari Aplikasi E-Performance	100 %
	Pengembangan Nilai-Nilai untuk Menegakan Integritas ASN	Pengukuran Kinerja SDM ASN Kemenkumham Tahun 2023	Dokumen Evaluasi Kinerja	100 %
		Melakukan Public Campaign Penegakan Disiplin Untuk Internal Pegawai Masing Masing Satker	Laporan Public Campaign	100 %
	Pelaksanaan *Core Values* ASN	Telah Dibangung Budaya Kerja dan Pola Pikir di Lingkungan Organisasi	• Surat Pernyataan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Budaya Kerja; • Dokumentasi Pegawai yang menerima *Reward and Punishment;* • Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Budaya Kerja	100 %

Tabel 3.30 Realisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan II

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja secara Berkala	• Monev Capaian Kinerja Triwulan I (Dokumen Rapat dan Laporan) dan Aplikasi Pelaporan (E-Monev, SMART, E-Performance) • Monev Anggaran Triwulan I (Dokumen Rapat dan Laporan)	100 %
	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran secara Periodik (e-Monev, SMART, dan E Performance)	Monev Capaian Kinerja Triwulan I (Dokumen Rapat dan Laporan) dan Aplikasi Pelaporan (E- Monev, SMART, E-Performance)	100 %
		Monitoring dan Evaluasi Atas Rencana Aksi Prioritas Nasional Tahun 2024	Laporan Prinas Triwulan I	100 %
	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Masing-Masing Unit Eselon I Tahun 2020 - 2024	SK Kepala BPSDM Hukum dan HAM Tentang Perubahan Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2024	100 %
Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Service)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik telah Diterapkan	• Laporan PPID Triwulan II • SK Tim PPID • Dokumen Rapat Tim PPID	100%
		Pelaksanaan Publikasi Pelayanan Publik Secara Elektronik dan Non Elektronik	Laporan Pelaksanan Publikasi Pelayanan Publik	100%
		Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	• Laporan Monev KIP Triwulan I • Laporan TL Monev KIP Triwulan I	100%
		Publikasi Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada Website dan Media Sosial	Laporan Publikasi Hasil Survei SPAK-SPKP Triwulan I	100%
		Menindaklanjuti Hasil	Laporan TL Hasil	100%

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
		Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari Aplikasi 3AS	Survei SPAK- SPKP Triwulan I	
		Telah Dilakukan Berbagai Upaya Peningkatan Kemampuan dan/atau Kompetensi tentang Penerapan Budaya Pelayanan Prima	Laporan Monev Petugas Pelayanan Publik	100%
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Terdapat Mekanisme atau Media Untuk Mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM	• Dokumen Sosialisasi ZI Dokumentasi Sosialiasasi ZI Ke Masyarakat	100%
		Seluruh Kegiatan Pembangunan Sudah Dilaksanakan Sesuai Dengan Rencana	• Dokumen Pelaksanaan dan Target Prioritas ZI • Laporan Rencana Kerja Pembangunan ZI	100%
	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun Lingkungan Pengendalian	• SK Tim SPIP • Dokumen dan Laporan SPIP • Laporan Penerapan Inovasi Lingkungan Pengendalian • Kertas Kerja Penerapan MR	100%
		Telah Dilakukan Penilaian Risiko atas Pelaksanaan Kebijakan	• Kertas Kerja Penerapan MR • Piagam MR • Laporan Penanganan Risiko atas Pelayanan Publik dan Integritas • Laporan Pemantauan MR Semester I	100%
		Pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	• Laporan Pelaksanaan Pemantauan Penanganan Risiko	100%

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
			• Laporan Penerapan MR	
	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah Diimplementasikan	• SK Pengaduan • Capture Pusat Layanan Terpadu • Capture Aplikasi Layanan Pengaduan • Laporan PengaduanTriwulan II	100%
		Menindaklanjuti Laporan Penyelesaian Pengaduan dari Aplikasi LAPOR	Laporan SP4N LAPOR Triwulan II	100%
	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Melakukan Survei Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalu Aplikasi 3AS	Laporan Survei Integritas	100%
		Sosialisasi Benturan Kepentingan	Laporan Sosialiasi Benturan Kepentingan	100%
		Telah Dilakukan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	100%
		Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Telah Ditindaklanjuti	Laporan TL Monev Benturan Kepentingan	100%
		Monitoring dan Evaluasi secara Mandiri Hasil Survei Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Laporan Monev Survei Integritas	100%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Pemeliharaan dan Alih Media Arsip Elektronik	Laporan Pelaksanaan Alih Media Arsip Triwulan II	100%
		Penggunaan Aplikasi Srikandi Untuk Persuratan Keluar	Laporan Penggunaan Aplikasi Srikandi Triwulan II	100%
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN Secara Berjenjang yang Kewenangannya Berada Pada Pengelola Barang/Kementerian Keuangan Unit Eselon I kepada Sekretariat Jenderal	Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Inventaris Kantor	100%

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
		Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Biro Keuangan Bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah tentang Monev Pelaksanaan Anggaran	Laporan TL Hasil Evaluasi Biro Keuangan tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV TA 2023	100%
Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan Fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Sistem Merit	Uji Potensi dan Uji Kompetensi Manajerian Sosial Kultural	• Laporan Rekapitulasi AK Utama Imigrasi • Rekapitulasi Hasil Penilaian Kompetensi BSK	100%
		Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi	• Laporan Kegiatan Penilaian Kompetensi Kanwil Bali • Rekapitulasi Kompetensi Bali • Laporan Pelaksanaan Aceh • Rekapitulasi Aceh • Laporan Kegiatan Penilaian Kompetensi Kanwil Lampung • Rekapitulasi Penilaian Kompetensi Kanwil Lampung	• 100%
		Laporan Hasil Penilaian Kompetensi	• Laporan Kegiatan Penilaian Kompetensi Kanwil Bali • Laporan Pelaksanaan Aceh • Laporan Kegiatan Penilaian Kompetensi	• 100%

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
			• Kanwil Lampung	
		Pendampingan Penyusunan Analisis Jabatan Kementerian Hukum dan HAM	• Laporan Penyusunan Anjab ABK • Daftar Hadir Pendampingan Penyusunan Anjab • Dokumentasi Pendampingan Penyusunan Anjab • Output Pendampingan Penyusunan Anjab • Surat Karoren Ke Sekretaris BPSDM ABK BPSDM • Surat Karoren Pengisian ABK Unit Eselon I	• 100%
		Monitoring dan Evaluasi Implementasi Penegakan disiplin Pegawai	Laporan Monev Penegakan Disiplin Triwulan II	100%
		Inventarisasi Data Pegawai Terkait BPJS, BP TAPERA dan TASPEN	Rekapitulasi BPJS, BP TAPERA dan TASPEN Pegawai	100%
	Pelaksanaan Core Values ASN	Telah Dibangun Budaya Kerja dan Pola Pikir di Lingkungan Organisasi	Dokumentasi Penyerahan Reward Pegawai Terdisiplin	100%

Tabel 3.31 Realisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan III

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja secara Berkala	• Dokumen Monev Pencapaian Kinerja dan Anggaran • Laporan Tindak Lanjut Monev Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II	100%

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
		Evaluasi Mandiri AKIP oleh Tim Penilai Mandiri UPT, Kanwil dan Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Berita Acara Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Kemenkumham 2020 dan 2023	100%
		Publikasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja pada Website Kemenkumham	Laporan Publikasi RenstraTahun 2024	100%
	Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran secara Periodik (e-Monev, SMART, dan E-Performance)	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja dan Anggaran B09	100%
	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kementerian Hukum dan HAM	Dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 yang didapat dari aplikasi SAKTI	100%
Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Service)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik telah Diterapkan	• SK Tim PPID • Notula Rapat Tim PPID • Daftar Hadir Rapat Tim PPID • Laporan PPID Triwulan III • Undangan Rapat Tim PPID	100%
		Telah Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	• Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Triwulan II • Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Triwulan II	100%
		Publikasi Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) pada Website	Laporan Publikasi SPAK- SPKP Triwulan II	100%

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
		dan Media Sosial		
		Menindaklanjuti Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari Aplikasi 3AS	Laporan Hasil Tindak Lanjut SPAK-SPKP Triwulan II	100%
		Menindaklanjuti Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Berdasar Pada Peraturan Menteri PAN- RB Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh Satuan Kerja	Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik	100%
		Telah Dilakukan Berbagai Upaya Peningkatan Kemampuan dan/atau Kompetensi tentang Penerapan Budaya Pelayanan Prima	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Pelayanan Prima Triwulan II	100%
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Terdapat Mekanisme atau Media Untuk Mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM	• Laporan Kegiatan Sosialisasi ZI Triwulan III • Dokumen Sosialisasi ZI dan SPIP • Banner Zona Integritas BPSDM Hukum dan HAM • Capture Website Sosialisasi ZI kepada Masyarakat • Capture Sosialisasi ZI pada Media Sosial	100%
		Seluruh Kegiatan Pembangunan Sudah Dilaksanakan Sesuai Dengan Rencana	• Rapat Pelaksanaan Rencana Kerja danTarget Prioritas Pembangunan ZI Menuju WBK	100%

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
			• Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Target Prioritas ZI Triwulan III	
	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun Lingkungan Pengendalian	• Laporan Penerapan Inovasi Lingkungan Pengendalian Triwulan III • Laporan Kegiatan Sosialisasi SPIP Triwulan III • Dokumen Sosialiasi ZI dan SPIP • Dokumen MR BPSDM • SK Perubahan Kedua Tim SPIP • SK Perubahan Kedua Tim Asesor SPIP	100%
		Telah Dilakukan Penilaian Risiko atas Pelaksanaan Kebijakan	• Dokumen MR BPSDM • Piagam MR BPSDM • Laporan Penanganan Risiko Atas Pelayanan Publik dan Integritas	100%
	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan Masyarakat telah Diimplementasikan	• SK Pengaduan • Foto Petugas dan Ruangan Pengaduan • Capture Aplikasi Pengaduan Triwulan III • Laporan Penanganan Pengaduan Triwulan III	100%
		Menindaklanjuti Laporan Penyelesaian Pengaduan dari	Laporan Penanganan Pengaduan Triwulan III	100%

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
		Aplikasi LAPOR		
	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Menindaklanjuti Hasil Monitoring dan Evaluasi Secara Mandiri Hasil Survei Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Survei Integritas	100%
		Telah Dilakukan Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan	100%
		Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Telah Ditindaklanjuti	Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan	100%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Pemeliharaan dan Alih Media Arsip Elektronik	Laporan Pelaksanaan Alih Media Arsip Triwulan III	100%
		Penggunaan Aplikasi Srikandi Untuk Persuratan Keluar	Laporan Penggunaan Aplikasi Srikandi Triwulan III	100%
		Pelaksanaan Penyusutan Arsip dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip	Laporan Usulan Pemusnahan Arsip	100%
		Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di lingkungan Kemenkumham, Meliputi Penciptaan Arsip, Penggunaan Arsip, Pemeliharaan Arsip dan Penyusutan Arsip	Laporan Pengawasan Kearsipan	100%
		Pelaksanaan Tata Kelola Kearsipan Meliputi Pengelolaan Arsip Aktif	Laporan Pengelolaan Arsip Aktif	100%
		Pelaksanaan Tata Kelola Kearsipan Meliputi Pengelolaan	Laporan Pengelolaan Arsip Inaktif	100%

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
		Arsip Inaktif		
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Pengawasan dan Pengendalian BMN	Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester I	100%
		Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Biro Keuangan Bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah tentang Monev Pelaksanaan Anggaran	Laporan TL Hasil Evaluasi Biro Keuangan tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024	100%
Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan Fungsional, Penguatan Manajemen Talenta ASN, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Sistem Merit	Penilaian Kompetensi Pegawai Berdasar Pada Hasil Inventarisasi Pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang Belum Mengikuti Penilaian Kompetensi dengan Target 5%	Laporan SJT Final dan Berita Acara	100%
		Menindaklanjuti Hasil Inventarisasi Data Pegawai Terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang Belum Terdaftar	Laporan Tindak Lanjut Inventarisasi Data Pegawai	100%
	Pelaksanaan Core Values ASN	Telah Dibangun Budaya Kerja dan Pola Pikir di Lingkungan Organisasi	● Berita Acara Hukdis Triwulan II ● SK Pegawai Terdisiplin dan Tidak Terdisiplin ● Piagam Penghargaan Pegawai Terdisiplin	100%

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPSDM Hukum dan HAM, sebagai berikut:

1. BPSDM Hukum pada Tahun 2024 telah melaksanakan program reformasi birokrasi yang mencakup 10 (sepuluh) sasaran yakni terimplementasikannya kebijakan penyederhanaan birokrasi; terimplementasikannya kebijakan arsitektur SPBE; terimplementasikannya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja

yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; terbangunnya pelayanan publik digital (*digital service*); meningkatnya kualitas pengawasan; meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral; meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset; terselenggaranya manajemen talenta ASN yang efektif dan efisien; terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja; meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN yang terdapat pada Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi BPSDM HukumTahun 2024.

2. BPSDM Hukum telah melaksanakan proses pembangunan zona integritas yang mencakup 6 (enam) area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas BPSDM Hukum Tahun 2024.
3. BPSDM Hukum telah mendistribusikan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi dan lembar kerja evaluasi pembangunan zona integritas tahun 2024 kepada seluruh penanggung jawab kegiatan guna mendukung pelaksanaan reformasi birokasi tahun 2024.
4. Sampai dengan Bulan Desember tahun 2024, BPSDM Hukum telah melakukan seluruh kegiatan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi dan telah dilakukan evaluasi oleh evaluator dari Inspektorat Jenderal dengan hasil 100% tercapai.
5. BPSDM Hukum telah melakukan beberapa kegiatan pada lembar kerja evaluasi zona integritas. Dari hasil yang diperoleh, diketahui bahwa seluruh area perubahan di pembangunan zona integritas belum mencapai 100%.
6. Untuk seluruh area perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM belum mencapai 100% dikarenakan banyak data dukung yang belum diunggah ke dalam aplikasi ERB Kemenkumham dikarenakan belum terlaksananya dan terdokumentasinya seluruh kegiatan yang menunjang LKE WBK/WBBM dengan baik.

Rekomendasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

1. BPSDM Hukum perlu lebih banyak mengadakan kegiatan *benchlearning* ke Instansi Kementerian/Lembaga lain guna meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. BPSDM Hukum sebagai eselon I pembina perlu lebih banyak melakukan pembinaan berupa monitoring dan evaluasi kepada Politeknik dan Balai Pendidikan dan Pelatihan terkait implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.
3. BPSDM Hukum perlu melakukan sosialisasi guna menyamakan persepsi dan sebagai bentuk komitmen bersama bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi bukan hanya menjadi tugas dan fungsi subkoordinasi reformasi birokrasi namun menjadi tugas dan fungsi seluruh unsur organisasi dan menjadi tujuan utama organisasi.
4. BPSDM Hukum perlu memahami bahwa Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum harus menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kegiatan.
5. BPSDM Hukum perlu melakukan internalisasi dan penguatan kembali terkait pembangunan zona integritas menuju wbk/wbbm guna menyemangati pegawai bahwa walaupun BPSDM Hukum saat ini tidak mengikuti kontestasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, namun tetap harus melakukan pengunggahan data dukung pada aplikasi ERB Kemenkumham sebagai salah satu bentuk proses pembangunan zona integritas.
6. Bagian Umum perlu melakukan pemantauan secara berkala terkait kinerja Hubungan Masyarakat dan Kerjasama guna menanggulangi kurang maksimalnya data dukung terkait administrasi pengelolaan pengaduan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengunggahan data dukung dalam aplikasi ERB Kemenkumham.
7. Unit Kerja di lingkungan BPSDM Hukum perlu lebih tertib administrasi, dikarenakan banyaknya kegiatan yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah diselenggarakan namun tidak ada dokumen dan laporannya sehingga tidak ada bukti yang dapat diunggah pada aplikasi ERB Kemenkumham.

04 BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data dari hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan, diketahui pada tahun 2024 BPSDM Hukum dan HAM telah berhasil melakukan pengembangan kompetensi kepada 363.736 orang pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM baik dengan DIPA BPSDM Hukum dan HAM maupun anggaran PNBP dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 4.1 Output Pengembangan Kompetensi

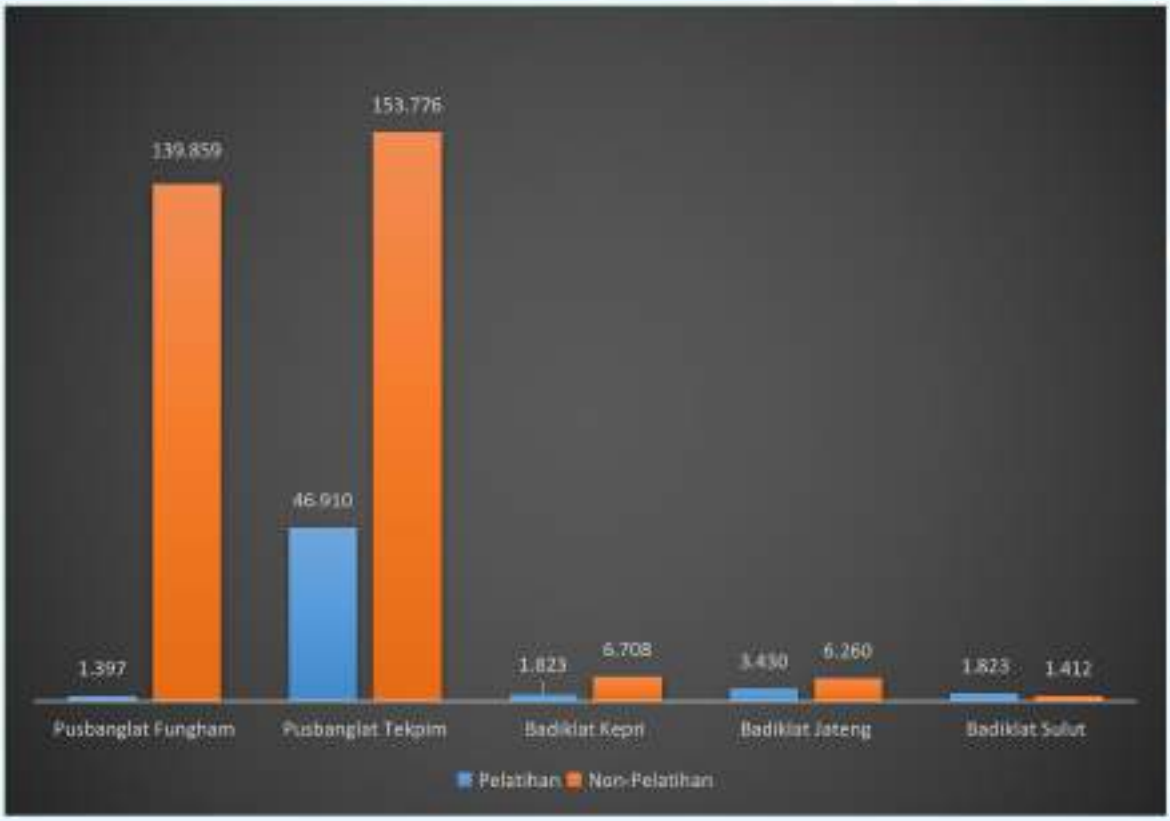

Selain melakukan pengembangan kompetensi terhadap Aparatur Kementerian Hukum dan HAM, pada Tahun 2024 BPSDM Hukum dan HAM juga telah melakukan pengembangan kompetensi terhadap 589 Aparatur Penegak Hukum dan Instansi terkait lainnya yang termasuk dalam prioritas nasional melalui penyelenggaraan diklat Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 319 orang dan diklat Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak 270 orang, Berikut rincian

Grafik 4.2 Capaian Kegiatan Prioritas Nasional

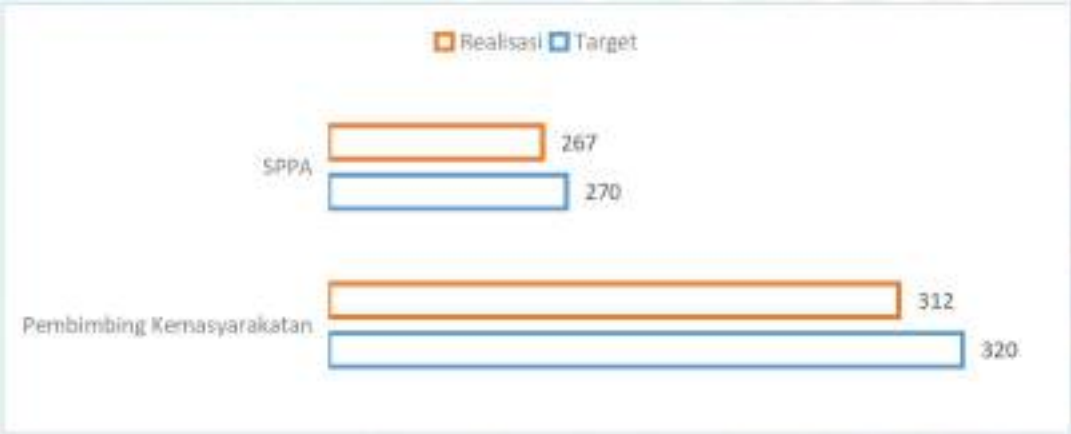

Selain bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan BPSDM Hukum dan HAM juga memiliki tugas melakukan penilaian kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini merupakan tanggung jawab Pusat Penilaian Kompetensi sebagai salah satu Unit Eselon II di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM melaksanakan tugas tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan Uji Kompetensi, *Assessment Center*, Penilaian Kompetensi, terhadap pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM dengan total sebanyak 5.520 pegawai selama Tahun 2024.

BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan pendidikan kedinasan di bidang Pemasyarakatan dan Keimigrasian. Pendidikan kedinasan di bidang Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang pada tahun 2024 melulusan taruna sebanyak 334 orang. Sedangkan pendidikan kedinasan di bidang Imigrasi diselenggarakan oleh Politeknik Imigrasi, pada Tahun 2024 telah meluluskan 291 taruna.

B. Saran

BPSDM Hukum dan HAM secara berkelanjutan terus berusaha mengatasi setiap tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerjanya di masa-masa mendatang. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan BPSDM Hukum dan HAM guna meningkatkan kinerjanya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan sarana pembelajaran di ruang kelas untuk menunjang kegiatan pelatihan dengan metode klasikal;
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana asrama peserta pelatihan untuk memberikan kenyamanan para peserta selama mengikuti kegiatan pelatihan;

3. Update kurikulum dan modul pelatihan agar sesuai dengan situasi perkembangan jaman;
4. Kuantitas dan kualitas pelaksanaan uji kompetensi perlu untuk terus ditingkatkan, mengingat jumlah pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang sangat besar. Diperlukan pengembangan teknologi informasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelaksanaan uji kompetensi;
5. Untuk dapat diperoleh data secara akurat dan pasti alumni peserta pelatihan yang yang sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya maka perlu dilakukan uji kompetensi terhadap peserta pelatihan sebelum dan sesudah melaksanakan pelatihan;
6. BPSDM Hukum dan HAM perlu untuk menambah bentuk-bentuk pengembangan kompetensi selain pelatihan klasikal dan e-learning dalam rangka meningkatkan output pelatihan dan merespon Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dimana setiap ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi;
7. Pelaksanaan kegiatan baik pelatihan maupun non pelatihan agar memperhatikan kalender kegiatan dan disbursemenplan yang telah ditetapkan agar tidak mempengaruhi nilai IKPA dan juga SMART Direktorat Jenderal Anggaran yang menjadi nilai kinerja organisasi;
8. Melakukan pemantauan secara berkala kinerja BPSDM Hukum dan HAM dan Satuan Kerja sekurang-kurangnya per triwulan sebagai bahan laporan kepada pimpinan dan untuk mendapatkan informasi terhadap capaian, hambatan/kendala, sehingga dapat dijadikan perbaikan pada kinerja triwulan berikutnya;
9. BPSDM Hukum dan HAM perlu melakukan review terhadap manual IKU yang telah disusun agar sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan;
10. Menyusun pedoman pelaksanaan administrasi BPSDM Hukum dan HAM yang dapat menjadi rujukan dalam melaksanaan tusi administrasi meliput kinerja perencanaan, kinerja kepegawaian, kinerja keuangan, kinerja BMN, dan kinerja evaluasi dan pelaporan;
11. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala untuk memastikan:
    i. Penyerapan anggaran sesuai dengan *timeline* kalender kegiatan dan *Disbursment Plan* yang telah disusun;

ii. Optimalisasi anggaran sisa anggaran kegiatan yang telah selesai diselenggarakan;
iii. Pertanggunjawaban administrasi kegiatan terselesaikan tepat waktu;
iv. Unit dan Satuan Kerja melakukan langkah-langkah percepatan realisasi anggaran yang masih di bawah target.

12. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada Unit dan Satuan Kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM terkait updating peraturanperaturan terkait kinerja pelaksanaan anggaran